



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 50 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Dinas Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022 NOMOR 50**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 50 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi maupun APBN.

Rencana Kerja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya ke dalam program dan kegiatan. Kualitas Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

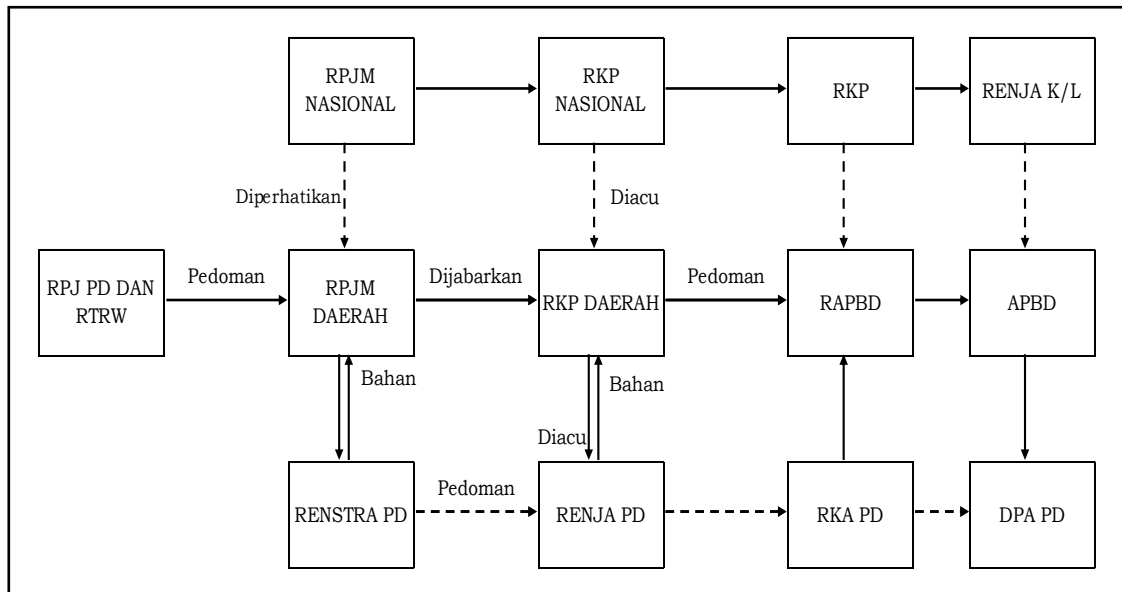
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Kerja terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan.



Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Rencana Kerja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan RKPD, Rencana Strategis dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar.1  
Keterkaitan Renja, Renstra dan Dokumen Lainnya



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2019-2024, dalam penyusunannya mengacu pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023. Selain mengacu kepada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023, Rencana Kerja Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 yang fokus pada 5 (lima) program prioritas utama dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur serta mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Program prioritas utama dalam Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 yang terkait dengan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023:

1. Bidang Sumber Daya Air yang fokus pada pemenuhan kebutuhan air baku, pengendalian banjir dan pengelolaan jaringan irigasi;
2. Bidang Jalan dan Jembatan yang fokus pada peningkatan konektivitas dan peningkatan aksesibilitas;
3. Bidang Permukiman yang fokus pada Pembangunan dan Peningkatan SPAM, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Selain mengacu kepada RKPD Kabupaten Garut dan Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 juga mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dengan prioritas pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, *Jabar Zero New Stunting*, dan penanganan kemiskinan ekstrem. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang terkait dengan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023g antara lain Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana dan Pengembangan Infrastruktur, Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rencana Kerja Tahun 2023 akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023 (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rencana Kerja Tahun 2023 mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Organisasi Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1 Maksud**

Menjelaskan rumusan prioritas pembangunan, program, sasaran program, kegiatan, lokasi kegiatan, besaran dan sumber dana dan pelaksanaan kegiatan.

#### **1.3.2 Tujuan**

1. Sebagai acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan secara teknis administratif dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Garut Tahun 2023;

2. Memberikan perspektif tentang apa yang ingin dihasilkan ke depan;
3. Memberikan gambaran mengenai target yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Menjelaskan rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mencapai target capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Renstra 2019-2024.

##### **Bab V Penutup**

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan renja.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja tahun 2021 melalui analisis terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Analisis dilakukan terhadap kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Evaluasi pencapaian tersebut akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, serta menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021 melaksanakan 11 (sebelas) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan. Pada umumnya program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021 telah sesuai rencana dengan capaian kinerja sasaran sebesar 96,76%. Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian sasaran strategis yang diukur dari 12 (dua belas) indikator kinerja. 11 (sebelas) indikator kinerja memperoleh kategori “Baik” dengan capaian > 85% dan 1 (satu) indikator kinerja memperoleh kategori “Cukup” dengan capaian > 70% s.d 85%, baik capaian masukan (*input*) keluaran (*output*) maupun hasil (*outcome*).

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik rencana maupun realisasi. Evaluasi ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output yang dihasilkan oleh suatu input tertentu yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya perbedaan maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pencapaian realisasi input sebesar Rp422.083.471.748,00 atau sebesar 96,20% dari total pagu anggaran Rp438.772.656.988,21. Hal ini disebabkan oleh adanya paket pekerjaan yang tidak dapat direalisasikan dan paket pekerjaan yang tidak selesai sampai akhir tahun anggaran 2021.

Pada indikator outputs pencapaian pada rata-rata kegiatan/sub kegiatan sebesar 97,02%, ini mengandung arti dari setiap perencanaan yang ditetapkan dapat mencapai target, begitu pula pada indikator outcome capaian kinerja rata-rata sebesar 92,37%. Dibandingkan dan dievaluasi dari target kinerja selama 5 tahun (RPJMD Tahun 2014-2019), rata-rata persentase pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2021 sebesar 96,76% dengan interpretasi baik.



Keberhasilan yang diperoleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak terlepas dari kendala dan permasalahan. Identifikasi permasalahan yang terjadi selama proses pencapaian sangat penting untuk diketahui, agar dapat ditetapkan langkah-langkah strategis sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama di tahun mendatang. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghadapi beberapa kendala masalah sosial, kendala pembebasan lahan, kendala cuaca, kinerja kontraktor yang kurang baik dan adanya pandemi *Covid-19* yang berpengaruh terhadap waktu penyelesaian pekerjaan. Di samping itu, kurangnya pembinaan teknis, sarana dan prasarana, program pembiayaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja juga menjadi kendala dalam upaya perwujudan akuntabilitas kinerja.

Perwujudan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih rendah, hal ini diakibatkan oleh kurangnya koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha. Hal ini menyebabkan keseluruhan sumber daya yang ada tidak dapat digunakan secara optimal demi tercapainya kinerja yang maksimal. Di samping itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdampak terhadap kualitas akuntabilitas kinerja program dan kegiatan. Untuk mengatasi masalah yang tersebut di atas, maka perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala bagi pegawai dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga kendala kekurangan SDM ini dapat teratasi dan akuntabilitas kinerja yang berkualitas dapat terwujud.

Permasalahan secara umum pada Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang antara lain pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, masih rendahnya produk hukum rencana tata ruang, masih banyaknya rumah dan gedung yang belum memiliki IMB/PBG, konektivitas antar wilayah masih belum memadai, belum fungsionalnya jalan baru dan rendahnya cakupan pelayanan air minum dan sanitasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dirumuskan pemecahan masalah yang akan dilakukan diantaranya membuat kebijakan produk rencana tata ruang, meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang, memantapkan peran koordinasi perencanaan di tingkat kabupaten, meningkatkan kinerja penyelenggaraan jalan dan meningkatkan pengelolaan air minum dan sanitasi.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PERSENTASE TAMPUNGAN AIR YANG TERSEDIA	100%		30,16%	23,81%	78,95	57,14%	34,92%	34,92		
1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tampungan air baku yang dibangun	63 Unit		8 Unit	8 Unit	100,00	7 Unit	22 Unit	34,92	
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan lingkungan untuk konstruksi	3 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun	43 Unit		8 Unit	8 Unit	100,00	7 Unit	20 Unit	46,51
1	03	02	2.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dibangun	9 Unit		75 Unit	75 Unit	100,00	60 Unit	135 Unit	1500,00
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul yang dibangun	51,33 Km		3,32 Km	3,32 Km	100,00	3,92 Km	7,24 Km	14,10
1	03	02	2.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Luas/panjang kolam retensi yang dibangun	0,90 Km		0 Km	0 Km	0,00	0 Km	0 Km	0,00
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai/kali yang dinormalisasi	50 Km		9,74 Km	9,74 Km	100,00	10 Km	19,74 Km	39,48
1	03	02	2.01	47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah mata air yang dibangun/dibebaskan	11 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	0 Unit	0 Unit	0,00
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan	15 Kelompok/ Sub DAS		0 Kelompok/ Sub DAS	0 Kelompok/ Sub DAS	0,00	0 Kelompok/ Sub DAS	0 Kelompok/ Sub DAS	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		<b>PERSENTASE LUAS AREAL YANG TERLAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI</b>	<b>88,04%</b>		<b>76,83%</b>	<b>81,89%</b>	<b>106,59</b>	<b>80,70%</b>	<b>83,00%</b>	<b>94,28</b>				
1	03	02	2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang jaringan irigasi yang dibangun, direhab dan dipelihara</b>	<b>327 Km</b>		<b>139,48 Km</b>	<b>139,48 Km</b>	<b>100,00</b>	<b>52,99 Km</b>	<b>192,47 Km</b>	<b>58,86</b>	
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan teknis konstruksi irigasi	13 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	2 Km		0 Km	0 Km	0,00	0 Km	0 Km	0,00
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang direhab	97 Km		36,03 Km	36,03 Km	100,00	52,99 Km	89,02 Km	91,77

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	105 Km		103,45 Km	103,45 Km	100,00	95,22 Km	105 Km	100,00
1	03 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>CAKUPAN AIR MINUM LAYAK</b>	<b>90,74%</b>		<b>88,74%</b>	<b>86,96%</b>	<b>97,99</b>	<b>89,27%</b>	<b>89,27%</b>	<b>98,38</b>
1	03 03 2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rumah tangga yang terlayani/ terpasang SPAM</b>	<b>43592 SR</b>		<b>7105 SR</b>	<b>7105 SR</b>	<b>100,00</b>	<b>4755 SR</b>	<b>11860 SR</b>	<b>27,21</b>
1	03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen perencanaan teknis SPAM	10 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
1	03 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah rumah tangga terlayani/ terpasang jaringan perpipaan	14700 SR		0 SR	0 SR	0,00	0 SR	0 SR	0,00
1	03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani/ terpasang jaringan perpipaan	17142 SR		3250 SR	3250 SR	100,00	2880 SR	6130 SR	35,76

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani/ terpasang jaringan perpipaan	8750 SR		2385 SR	2385 SR	100,00	0 SR	2385 SR	27,26
1	03	03	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang mendapat pengawasan dan pembinaan	25 Desa/Kelompok		5 Desa/ Kelompok	5 Desa/ Kelompok	100,00	5 Desa/ Kelompok	10 Desa/ Kelompok	40,00
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani/ terpasang jaringan perpipaan	3750 SR		700 SR	700 SR	100,00	1875 SR	2575 SR	68,67
1	03	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>CAKUPAN SANITASI LAYAK</b>	<b>68,53%</b>		<b>67,27%</b>	<b>67,20%</b>	<b>99,90</b>	<b>67,69%</b>	<b>67,69%</b>	<b>98,77</b>
1	03	05	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rumah tangga yang mempunyai pengolahan air limbah domestik</b>	<b>15430 RT/KK</b>		<b>1340 RT/KK</b>	<b>1340 RT/KK</b>	<b>100,00</b>	<b>3675 RT/KK</b>	<b>5015 RT/KK</b>	<b>32,50</b>
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan teknis pengelolaan air limbah	16 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah rumah tangga yang berakses sub sistem pengolahan setempat	12430 RT/KK		440 RT/KK	440 RT/KK	100,00	1925 RT/KK	2365 RT/KK	19,03
1 03 05 2.01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah tangga yang berakses sistem pengolahan limbah skala permukiman	3000 RT/KK		900 RT/KK	900 RT/KK	100,00	1750 RT/KK	2650 RT/KK	88,33
1 03 08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG YANG LAYAK TEKNIS DAN FUNGSI</b>	<b>9,98%</b>		<b>8,40%</b>	<b>8,40%</b>	<b>100,00</b>	<b>8,92%</b>	<b>8,92%</b>	<b>89,38</b>
1 03 08 2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Jumlah bangunan gedung yang layak teknis dan fungsi</b>	<b>782 Unit</b>		<b>378 Unit</b>	<b>436 Unit</b>	<b>115,34</b>	<b>222 Unit</b>	<b>658 Unit</b>	<b>84,14</b>
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah bangunan gedung yang ber IMB/PBG dan bangunan gedung yang mempunyai Sertifikat Layak Fungsi	515 Unit		325 Unit	373 Unit	114,77	210 Unit	583 Unit	113,20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan bangunan gedung	30 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	80,00	0 Dokumen	4 Dokumen	13,33
					Jumlah bangunan gedung daerah yang terbangun	17 Unit		3 Unit	1 Unit	33,33	2 Unit	3 Unit	17,65	
1	03	08	2.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang mendapat bantuan teknis	250 Unit		50 Unit	62 Unit	124,00	10 Unit	72 Unit	28,80
1	03	08	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara	3 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
1	03	09			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>PERSENTASE LUAS BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG TERTATA</b>	<b>30,00%</b>		<b>6,00%</b>	<b>6,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>12,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>40,00</b>
1	03	09	2.01		<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Luas bangunan dan lingkungan yang ditata</b>	<b>7500 M2</b>		<b>1500 M2</b>	<b>1500 M2</b>	<b>100,00</b>	<b>757,60 M2</b>	<b>2257,60 M2</b>	<b>30,10</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan	3 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Luas bangunan dan lingkungan yang ditata	7500 M2		1500 M2	1500 M2	100,00	757,60 M2	2257,60 M2	30,10
1	03	09	2.01	06	Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penataan/ pemeliharaan bangunan dan lingkungan	3 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
1	03	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PERSENTASE KEMANTAPAN JALAN</b>	<b>57,92%</b>		<b>49,95%</b>	<b>49,92%</b>	<b>99,94</b>	<b>52,61%</b>	<b>52,61%</b>	<b>90,83</b>
1	03	10	2.01		<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang jalan yang dibangun, direkonstruksi, direhab dan dipelihara</b>	<b>1493 Km</b>		<b>277,09 Km</b>	<b>276,32 Km</b>	<b>99,72</b>	<b>309,66 Km</b>	<b>585,98 Km</b>	<b>39,25</b>
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	112 Dokumen		19 Dokumen	19 Dokumen	100,00	6 Dokumen	25 Dokumen	22,32

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Panjang lahan/tanah yang dibebaskan	54,36 Km		1,69 Km	1,69 Km	100,00	17,50 Km	19,19 Km	35,30
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang badan jalan baru yang terbangun	116,24 Km		10,60 Km	10,60 Km	100,00	45,35 Km	55,95 Km	48,13
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi	549,18 Km		80,23 Km	79,50 Km	99,09	53,13 Km	132,63 Km	24,15
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	123,50 Km		9,60 Km	9,60 Km	100,00	9,68 Km	19,28 Km	15,61
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	829 Km		174 Km	174 Km	100,00	201,50 Km	375,50 Km	45,30
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang terbangun	3 Km		0,23 Km	0,23 Km	100,00	0,64 Km	0,87 Km	29,00
1	03	10	2.01	13	Pembangunan <i>Flyover</i>	Panjang <i>flyover</i> yang terbangun	0,04 Km		0,04 Km	0,03 Km	75,00	0 Km	0,04 Km	100,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	1,43 Km		0 Km	0 Km	0,00	0,13 Km	0,13 Km	9,09
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara	0,86 Km		0,116 Km	0,116 Km	100,00	0,70 Km	0,816 Km	94,88
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang jalan dan jembatan yang ditanggulangi	10,15 Km		0,584 Km	0,584 Km	100,00	1,25 Km	1,834 Km	18,07
1	03	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	1 Dokumen	25,00
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	1 Dokumen	25,00
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>11</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>PERSENTASE TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DAN BERSERTIFIKAT</b>	<b>31,04%</b>		<b>19,64%</b>	<b>19,64%</b>	<b>100,00</b>	<b>23,44%</b>	<b>23,44%</b>	<b>75,52</b>
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang mendapat pelatihan dan bersertifikat	980 Orang		80 Orang	80 Orang	100,00	106 Orang	186 Orang	18,98

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019- 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi yang mendapat pelatihan	640 Orang		50 Orang	50 Orang	100,00	53 Orang	103 Orang	16,09
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi yang memiliki sertifikat	340 Orang		30 Orang	30 Orang	100,00	53 Orang	83 Orang	24,41
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>11</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah data dan sistem informasi jasa konstruksi</b>	<b>28 Dokumen</b>		<b>6 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>100,00</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>25,00</b>
1	03	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah perangkat layanan informasi jasa konstruksi	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	7 Dokumen	25,00
1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah data penggunaan material dan peralatan	10 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	40,00
1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah data dan profil pekerjaan konstruksi	8 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	0 Dokumen	2 Dokumen	25,00
1	03	11	2.02	09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi	6 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		<b>PERSENTASE PROYEK TANPA KECELAKAAN KONSTRUKSI</b>	100,00%		100,00%	100,00%	100,00	100,00%	100,00%	100,00				
1	03	11	2.04	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	Jumlah pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan evaluasi	260 Proyek		66 Proyek	66 Proyek	100,00	37 Proyek	103 Proyek	39,62	
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan evaluasi	260 Proyek		66 Proyek	66 Proyek	100,00	37 Proyek	103 Proyek	39,62
1	03	12		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP RENCANA TATA RUANG</b>	84,50%		83,00%	83,00%	100,00	83,50%	83,50%	98,82	
1	03	12	2.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang	70 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	10 Dokumen	20 Dokumen	28,57	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR/RDTR dan dokumen peta dasar dan tematik RDTR	41 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100,00	9 Dokumen	18 Dokumen	43,90
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah peraturan pelaksanaan penataan ruang	29 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2 Dokumen	6,90
1	03	12	2.03		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen pemanfaatan ruang</b>	<b>5 Dokumen</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100,00</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>40,00</b>
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2 Dokumen	40,00
1	03	12	2.04		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang</b>	<b>5 Dokumen</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100,00</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>40,00</b>
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2 Dokumen	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	03	15			<b>PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>INDEKS AKSESIBILITAS</b>	<b>1,490 Point</b>	<b>1,386 Point</b>			
1	03	15	001		Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Baru	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan dan jembatan baru yang tersedia	100 Dokumen	30 Dokumen			
1	03	15	002		Pembebasan Tanah untuk Jalan	Panjang lahan/tanah yang dibebaskan untuk pembangunan jalan baru	62 Km	2 Km			
1	03	15	003		Pembangunan Jalan Baru	Panjang badan jalan baru yang terbangun	131 Km	3,70 Km			
1	03	15	004		Pembangunan Jembatan Baru	Jumlah jembatan baru yang dibangun	18 Bh	2 Bh			
1	03	16			<b>PROGRAM PENINGKATAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN</b>	<b>PERSENTASE KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN</b>	<b>100%</b>	<b>81,30%</b>			
1	03	16	020		Pembangunan Saluran Drainase Gorong-gorong Jalan Kabupaten	Panjang saluran drainase/gorong-gorong jalan kabupaten yang dibangun	50 Km	7,69 Km			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	03	16	022	Perencanaan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Jumlah dokumen perencanaan peningkatan/rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten yang tersedia	30 Dokumen	6 Dokumen				
1	03	16	023	Peningkatan Jalan Kabupaten	Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan	113,62 Km	55,90 Km				
1	03	16	024	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi	18,08 Km	1,84 Km				
1	03	16	025	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	Panjang jalan kabupaten yang dipelihara	754 Km	651,95 Km				
1	03	16	026	Peningkatan/Rehabilitasi Jembatan Kabupaten	Panjang jalan kabupaten yang dipelihara	15 Bh	10 Bh				
1	03	16	027	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten	Jumlah jembatan kabupaten yang dipelihara	100 Bh	12 Bh				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	03	16	028	Penanganan Sementara Akibat Bencana Alam	Jumlah waktu pelaksanaan penanganan sementara jalan	5 Tahun	1 Tahun			
1	03	16	029	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jalan Kabupaten	Panjang turap/talud/bronjong jalan kabupaten yang dibangun	7,50 Km	2,39 Km			
1	03	16	030	Tanggap Darurat Bencana Alam	Jumlah waktu penanganan tanggap darurat	5 Tahun	1 Tahun			
1	03	16	033	Pengadaan Alat Berat	Jumlah alat berat yang tersedia	31 Unit	3 Unit			
1	03	16	034	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah alat berat yang diperbaiki/dipelihara	28 Unit	8 Unit			
1	03	16	035	Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah alat laboratorium kebinamargaan yang diperbaiki/dipelihara	50 Unit	8 Unit			
1	03	16	036	Pengendalian dan Pengawasan Ruang Milik Jalan	Jumlah waktu pengendalian dan pengawasan ruang milik jalan	5 Tahun	1 Tahun			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	03	17		<b>PROGRAM PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN DESA</b>	<b>PERSENTASE KEMANTAPAN JALAN DESA</b>	39,33%	38,28%			
1	03	17	083	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa	Panjang jalan desa yang ditingkatkan/ direhabilitasi	146,40 Km	52,97 Km			
1	03	17	084	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jembatan Desa	Jumlah jembatan desa yang ditingkatkan/direhabilitasi	125 Bh	52 Bh			
1	03	17	085	Peningkatan/Pembangunan Saluran/Drainase/Gorong-gorong Jalan Desa	Panjang saluran drainase/gorong-gorong jalan desa yang ditingkatkan/dibangun	12,50 Km	2,39 Km			
1	03	17	086	Peningkatan/Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jalan Desa	Panjang turap/talud/bronjong jalan desa yang ditingkatkan/dibangun	12,50 Km	1,96 Km			
1	03	24		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA</b>	<b>PERSENTASE LUAS AREAL YANG TERLAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI TEKNIS</b>	82%	74,32%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	03	24	500	Perencanaan Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen perencanaan	25 Dokumen	0 Dokumen			
1	03	24	501	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah daerah irigasi teknis yang dipelihara	38 DI	38 DI			
1	03	24	502	Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis	Jumlah daerah irigasi teknis yang direhabilitasi/ditingkatkan	38 DI	32 DI			
1	03	24	506	Penanganan Sementara Irigasi Akibat Bencana Alam	Jumlah daerah irigasi yang ditangani	38 DI	0 DI			
					<b>PERSENTASE LUAS AREAL YANG TERLAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI NON TEKNIS</b>	<b>79,36%</b>	<b>73,34%</b>			
1	03	24	503	Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Non Teknis	Jumlah daerah irigasi non teknis yang di rehabilitasi/ditingkatkan	141 DI	153 DI			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	03	26		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA</b>	<b>PERSENTASE PENURUNAN TITIK RAWAN BANJIR</b>	88,09%	67,35%			
1	03	26	034	Peningkatan/Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai	Jumlah Sub DAS yang ditingkatkan/ dibangun	147 Sub DAS	80 Sub DAS			
1	03	26	035	Penanganan Sementara Sub DAS Akibat Bencana Alam	Jumlah Sub DAS yang ditangani	40 Sub DAS	8 Sub DAS			
					<b>PERSENTASE TAMPUNGAN AIR YANG TERSEDIA</b>	100%	6,93%			
1	03	26	037	Peningkatan/Pembangunan Embung	Jumlah embung yang ditingkatkan/ dibangun	16 Unit	5 Unit			
1	03	26	038	Pembebasan Sumber Mata Air	Jumlah mata air yang dibebaskan	75 Unit	2 Unit			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	03	28			<b>PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR</b>	<b>PERSENTASE PENURUNAN WAKTU GENANGAN AIR DI PERKOTAAN GARUT</b>	10%	43,33%			
1	03	28	001		Pengendalian Banjir Perkotaan	Jumlah titik genangan yang ditangani	20 Titik	6 Titik			
1	03	28	500		Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Jumlah Sub DAS yang dipelihara	10 Sub DAS	10 Sub DAS			
1	03	30			<b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN</b>	<b>CAKUPAN AIR MINUM LAYAK</b>	100%	85,08%			
1	03	30	154		Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan air bersih yang tersedia	20 Dokumen	4 Dokumen			
1	03	30	104		Pembangunan Jaringan Air Bersih	Jumlah unit/lokasi jaringan air bersih yang dibangun	254 Unit	102 Unit			
1	03	30	155		Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	Jumlah sumur-sumur air tanah yang dibangun	250 Titik	29 Titik			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		<b>CAKUPAN AIR SANITASI LAYAK</b>	<b>100%</b>	<b>67,03%</b>						
1	03	30	156	Perencanaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah dokumen perencanaan sarana dan prasarana sanitasi yang tersedia	25 Dokumen	1 Dokumen			
1	03	30	157	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun	476 Unit	102 Unit			
				<b>PERSENTASE PANJANG JALAN LINGKUNGAN DALAM KONDISI BAIK</b>	<b>60%</b>	<b>48,29%</b>				
1	03	30		Peningkatan/Pembangunan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan/dibangun	214,52 Km	34,09 Km			
1	03	30		Peningkatan/Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase yang ditingkatkan/dibangun	230,88 Km	13,04 Km			
1	03	30		PPeningkatan/Pembangunan TPT/Kirmir Lingkungan	Panjang turap/talud/bronjong jalan lingkungan yang ditingkatkan/dibangun	214,52 Km	1,05 Km			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019- 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	03	37								
			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP RENCANA TATA RUANG</b>	<b>90,50%</b>	<b>82,50%</b>				
1	03	37	10	Penyusunan RDTR	Jumlah RDTR yang tersusun	10 Dokumen	2 Dokumen			
1	03	37	12	Penyusunan Perda RDTR	Jumlah Perda RDTR yang tersusun	5 Dokumen	1 Dokumen			
1	03	37	13	Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah laporan kegiatan evaluasi pengendalian dan pemanfaatan ruang	5 Dokumen	1 Dokumen			
1	03	37	14	Pengawasan dan Pengendalian Pengesahan Site Plan	Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian pengesahan siteplan	5 Dokumen	1 Dokumen			
1	03	37	15	Pengawasan dan Pengendalian Rekomendasi Arahana Tata Ruang	Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian arahan tata ruang	5 Dokumen	1 Dokumen			





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	03	48	09	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan yang dimonitoring dan evaluasi	250 Kegiatan	51 Kegiatan				
1	03	48	14	Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi/Uji Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang mendapat sertifikat	200 Orang	0 Orang				
					<b>PERSENTASE DATA KAJIAN LITBANG</b>	<b>100%</b>	<b>11,11%</b>				
1	03	48	10	Kajian Potensi Bahan Lokal	Jumlah dokumen laporan kajian potensi bahan lokal yang tersedia	5 Dokumen	1 Dokumen				
1	03	48	11	Kajian Analisa Harga Satuan Berdasarkan Quarry	Jumlah dokumen laporan kajian analisa harga satuan berdasarkan quarry	5 Dokumen	1 Dokumen				
1	03	48	12	Pengumpulan dan Penyediaan Data Lingkup PUPR	Jumlah dokumen data lingkup PUPR yang tersedia	25 Dokumen	4 Dokumen				
1	03	48	13	Pilot Project Penerapan Teknologi Terapan	Jumlah dokumen teknologi terapan	4 Dokumen	0 Dokumen				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	03	48	14		Penyusunan Data Base Jalan	Jumlah laporan data base jalan	5 Dokumen	0 Dokumen			
1	03	48	15		Penyusunan Data Base Jembatan	Jumlah laporan data base jembatan	5 Dokumen	0 Dokumen			
1	03	48	16		Pembuatan Data Base Bangunan Gedung	Jumlah laporan data base bangunan	5 Dokumen	0 Dokumen			
1	03	49			<b>PROGRAM PEMBANGUNAN/PENINGKATAN GEDUNG PEMERINTAH DAN FASILITAS UMUM</b>	<b>PERSENTASE BANGUNAN YANG LAYAK TEKNIS</b>	<b>0,048%</b>	<b>0,05%</b>			
1	03	49	001		Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum yang tersedia	30 Dokumen	9 Dokumen			
1	03	49	002		Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun/ditingkatkan	57 Unit	0 Unit			
1	03	49	003		Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Umum	Jumlah fasilitas umum yang dibangun	250 Unit	29 Unit			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	03	49	004	Pengawasan dan Pengendalian Layak Teknis bangunan Gedung	Jumlah dokumen laporan pengawasan dan pengendalian layak teknis (SLF) bangunan gedung	5 Dokumen	1 Dokumen				
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>50</b>		<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN GEDUNG</b>	<b>PERSENTASE BANGUNAN BER IMB</b>	<b>43,20%</b>	<b>8,07%</b>				
1	03	50	001	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Bangunan	Jumlah dokumen bangunan Gedung Ber IMB	5 Dokumen	1 Dokumen				

Sumber : Renstra Dinas PUPR Tahun 2019-2024 dan Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2020-2021

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Penataan Ruang, Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, Jasa Konstruksi dan Bangunan. Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempertegas peran dan fungsi dinas dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Garut.

Secara umum pelaksanaan pembangunan dibidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Penataan Ruang, Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, Jasa Konstruksi dan Bangunan yang dilaksanakan pada periode sebelumnya telah mencapai kemajuan, hal ini dapat ditunjukkan dengan perkembangan indikator makro pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi termasuk sinergitas dan koordinasi pembangunan antar SKPD, antar Kabupaten/Kota dan dengan Pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Dalam perkembangan ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan responsif, kreatif dan inovatif sehingga mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mengukur seberapa besar keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya pada tingkat pelayanan, maka diperlukan adanya analisis kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digunakan beberapa indikator dengan sasaran target sesuai dengan Renstra.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra, sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Garut

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase kemantapan jalan kabupaten	-	-									
2	Indeks aksesibilitas	-	-									
3	Persentase tingkat kemantapan jalan desa	-	-									
4	Persentase kemantapan jalan	-	57,92%	49,95%	52,61%	55,27%	57,92%	49,92%	-	55,27%	57,92%	
5	Cakupan air minum layak	100%	90,74%	88,74%	89,27%	90,04%	90,74%	86,96%	-	90,04%	90,74%	
6	Cakupan sanitasi layak	100%	68,53%	67,27%	67,69%	68,11%	68,53%	67,20%	-	68,11%	68,53%	
7	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	-	-	53,00%				48,80%	-			
8	Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi teknis	-	-									
9	Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi non teknis	-	-									
10	Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi	-	88,04%	76,83%	80,70%	84,40%	88,04%	81,89%	-	84,40%	88,04%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Persentase penurunan waktu genangan air di perkotaan Garut	-	-									
12	Persentase penurunan titik rawan banjir	-	-									
13	Persentase penurunan luas genangan air	-	0%	60,00%	50,00%	25,00%	0,00%	70,00%	-	25,00%	0,00%	
14	Persentase tampungan air yang tersedia	-	-	30,16%	57,14%	82,54%	100,00%	23,81%	-	82,54%	100,00%	
15	Persentase bangunan ber IMB	-	-									
16	Persentase bangunan yang layak teknis	-	-									
17	Persentase bangunan gedung yang layak teknis dan fungsi	-	-	8,40%	8,92%	9,45%	9,98%	8,40%	-	9,45%	9,98%	
18	Persentase luas bangunan dan lingkungan yang tertata	-	-	6,00%	12,00%	20,00%	30,00%	6,00%	-	20,00%	30,00%	
19	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	-	-	83,00%	83,50%	84,00%	84,50%	83,00%	-	84,00%	84,50%	
20	Persentase tersedianya layanan rekomendasi IUJK	-	-									

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	-	-	19,64%	23,44%	27,24%	31,04%	19,64%	-	27,24%	31,04%	
22	Persentase data kajian litbang	-	-									
23	Persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	

Sumber : Renstra Dinas PUPR Tahun 2019-2024 dan Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021

Tabel 2.3  
Realisasi Kinerja Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)		Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.976.000.000	-	1.780.000.000	-	90,08%	-
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1.491.000.000	-	1.426.000.000	-	95,64%	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	119.000.000	-	119.000.000	-	100,00%	-
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	23.174.000.000	-	20.416.000.000	-	88,10%	-
5	Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten	97.526.000.000	-	94.266	-	96,66%	-
6	Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Desa	70.474.000.000	-	67.229.000.000	-	95,40%	-
7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	82.192.000.000	-	78.056	-	94,97%	-



No	Uraian	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)		Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
8	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	33.496.000.000	-	32.432.000.000	-	96,82%	-
9	Program Pengendalian Banjir	16.929.000.000	-	16.779.000.000	-	99,11%	-
10	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	64.469.000.000	-	61.597.000.000	-	95,55%	-
11	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2.121.000.000	-	1.926.000.000	-	90,81%	-
12	Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	815.000.000	-	810.000.000	-	99,39%	-
13	Program Pembangunan/ Peningkatan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum	9.283.000.000	-	7.741.000.000	-	83,39%	-
14	Program Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Gedung	297.000.000	-	294.000.000	-	98,99%	-
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	29.757.456.280	-	27.292.394.060	-	91,72%

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)		Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	-	56.230.390.016,29	-	52.832.222.581	-	93,96%
17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	26.447.665.000	-	26.149.140.600	-	98,87%
19	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	11.726.293.500	-	11.720.949.800	-	99,95%
20	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	-	6.456.600.227,55	-	6.330.765.838	-	98,05%
21	Program Pengembangan Permukiman	-	24.953.485.204	-	24.891.067.040	-	99,75%
22	Program Penataan Bangunan Gedung	-	55.601.180.100	-	52.149.480.414	-	93,79%
24	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	-	11.341.974.160	-	11.284.628.350	-	99,49%
25	Program Penyelenggaraan Jalan	-	210.456.264.462,37	-	203.937.837.865	-	96,90%

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)		Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
26	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	-	1.200.000.000	-	1.185.068.000	-	98,76%
27	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	4.601.348.038	-	4.309.917.200	-	93,67%
<b>Jumlah</b>		<b>404.369.000.000</b>	<b>438.772.656.988,21</b>	<b>384.879.000.000</b>	<b>422.083.471.748</b>	<b>95,18%</b>	<b>96,20%</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas PUPR Tahun 2020 dan 2021

**a. Infrastruktur Jalan**

Sampai dengan tahun 2021 tipe permukaan jalan kabupaten meliputi Aspal (AC, HRS, ATB) sepanjang 546,86 km (65,97%), Beton 163,87 km (19,77%), Lapis Penetrasi/Latasir/Macadam 68,29 km (8,24%), Telford/ Kerikil/Urpil 49,72 km (6%) dan Tanah/Belum Tembus sepanjang 0,26 km (0,03%).

Jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) sampai dengan tahun 2021 sepanjang 682,63 km (82,34%), mengalami peningkatan sepanjang 8,65 km dibandingkan dengan tahun 2020 sepanjang 673,98 (81,30%).

Tabel 2.4  
Tipe Permukaan Jalan Kabupaten s/d Tahun 2021

<b>Tipe Permukaan</b>	<b>Km</b>	<b>%</b>
Aspal (AC, HRS, ATB)	546,86	65,97
Perkerasan Beton	163,87	19,77
Lapis Penetrasi /Latasir/Macadam	68,29	8,24
Telford /Kerikil /Urpil	49,72	6,00
Tanah /Belum tembus	0,26	0,03
<b>Jumlah</b>	<b>829</b>	<b>100%</b>

Sumber : Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021

Tabel 2.5  
Kondisi Jalan Kabupaten s/d Tahun 2021

<b>Baik</b>		<b>Sedang</b>		<b>Rusak Ringan</b>		<b>Rusak Berat</b>	
<b>Km</b>	<b>%</b>	<b>Km</b>	<b>%</b>	<b>Km</b>	<b>%</b>	<b>Km</b>	<b>%</b>
520,75	62,82	161,88	19,53	51,17	6,17	95,20	11,48

Sumber : Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021

**b. Infrastruktur Irigasi**

Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi Teknis yang menjadi kewenangan kabupaten. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten sebanyak 38 dengan areal layanan seluas 16.067 Ha. Sampai dengan tahun 2021 areal yang terlayani seluas 13.157,71 Ha (81,89%) mengalami peningkatan seluas 1.216,72 Ha dibandingkan dengan tahun 2020 dengan areal layanan seluas 11.940,99 Ha (74,32%).

Sampai dengan tahun 2021 kondisi saluran irigasi dalam kondisi baik sepanjang 161,34 km (68,95%) dari total saluran sepanjang 233,98 km.

Tabel 2.6  
Layanan Areal Irigasi Kabupaten s/d Tahun 2021

Areal Layanan Baku (Ha)	Areal Terlayani (Ha)				
	Pembangunan	Peningkatan	Rehab	OP	Jumlah
16.067	-	-	2.006,50	11.151,21	13.157,71

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2021

Tabel 2.7  
Kondisi Saluran Irigasi Kabupaten s/d Tahun 2021

Jenis Saluran	Panjang Saluran	Kondisi Baik dan Rusak Ringan		Kondisi Rusak (sedang dan berat)	
		Panjang	%	Panjang	%
Saluran Primer	174,02	121,29	69,70%	52,73	30,30%
Saluran Sekunder	56,46	38,53	68,24%	17,93	31,76%
Saluran Tersier	3,50	1,52	43,43%	1,98	56,57%
<b>Jumlah</b>	<b>233,98</b>	<b>161,34</b>	<b>68,95%</b>	<b>72,64</b>	<b>31,05%</b>

Sumber : Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021

### c. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar untuk SPM Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Bupati Garut Nomor 150 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan *excellent*, maka Pemerintah Kabupaten Garut menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum.

Tabel 2.8  
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
s/d Tahun 2021

Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target Nasional (%)	Target Akhir Periode Renstra (2024)	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	90,74	87,74	86,96
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	68,53	67,27	67,20

Sumber : Laporan SPM Dinas PUPR Tahun 2021

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi Pembangunan Kabupaten Garut periode 2019-2024 adalah **“Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**. Rumusan visi ini mengandung tiga makna pokok visi di dalamnya yakni bertaqwa, maju dan sejahtera. Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut:

**Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

**Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

**Sejahtera** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Hasil rumusan rancangan teknokratik misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat Misi Kabupaten Garut tersebut di atas, maka misi Ketiga menjadi misi yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Misi tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya pencapaian prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Dari empat Misi RPJMD, terdapat Tujuan dan Sasaran beserta indikator sasaran yang akan dicapai sebagai *impact* penyelenggaraan Pembangunan Daerah Periode 2019-2024. Pada upaya pencapaian tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran:

**Tujuan** : Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas.

- Sasaran**:
1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian;
  2. Meningkatnya pemenuhan akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
  3. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir.

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut di atas dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur dengan pembangunan infrastruktur transportasi berupa jalan dan jembatan, peningkatan layanan terhadap akses pusat-pusat pertumbuhan baru serta daerah terisolir, infrastruktur sumber daya air dan irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, bangunan gedung, dan layanan jasa konstruksi.

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mengemban fungsi untuk pencapaian program nasional dan internasional seperti pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), arah pengembangan wilayah/penataan ruang serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/*SDGs*).

Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 96,76% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dengan capaian kinerja sebesar 92,37%. Dibandingkan dan dievaluasi dari target kinerja selama 5 tahun (RPJMD Tahun 2019-2024), capaian kinerja tahun 2021 berada pada katagori **“Baik”**. Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan target kinerja selama 5 tahun (RPJMD Tahun 2019-2024) sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem irigasi dan konservasi sumber daya air, diukur dengan 2 (dua) indikator. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 92,77%. Permasalahan yang masih dihadapi pada sasaran ini adalah pelaksanaan rehabilitasi dan OP irigasi dilaksanakan secara parsial belum menyeluruh untuk satu sistem jaringan irigasi, kualitas konstruksi masih rendah akibat spesifikasi untuk irigasi tidak terpenuhi sesuai kebutuhan, bencana alam dan perubahan *catchment area* yang menyebabkan kerusakan sub DAS, pembebasan lahan mengakibatkan terhambatnya upaya perlindungan sumber air dan tampungan air.
2. Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, tingkat capaian kinerja sebesar 97,99%. Permasalahan yang masih dihadapi pada sasaran ini adalah penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan air minum belum dilaksanakan berdasarkan skala prioritas baik lokasi pekerjaan maupun besaran anggaran. Kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi target *universal acces* 100%, sementara trend anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terus menurun, sehingga cakupan layanan belum sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk.
3. Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, tingkat capaian kinerja sebesar 99,90%. Permasalahan yang masih dihadapi pada sasaran ini adalah penyelenggaraan pemenuhan pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik belum dilaksanakan berdasarkan skala prioritas baik lokasi pekerjaan maupun besaran anggaran. Kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi target *universal acces* 100%, sementara trend anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terus menurun, sehingga cakupan layanan belum sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk.
4. Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, tingkat capaian kinerja sebesar 85,71% dengan kategori.



Permasalahan yang masih dihadapi pada sasaran ini adalah kapasitas drainase sudah tidak mencukupi, *run off* pada kawasan terbangun semakin tinggi dan belum dilakukan *update masterplan* pengelolaan sistem drainase terutama wilayah perkotaan.

5. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur permukiman, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, tingkat capaian kinerja sebesar 92,08%. Permasalahan yang masih dihadapi pada sasaran ini adalah kerusakan kembali konstruksi yang telah dibangun karena kualitas konstruksi, bangunan pelengkap (drainase) belum memadai dan tidak adanya upaya pemeliharaan pasca pembangunan.
6. Sasaran : Meningkatnya kualitas bangunan gedung, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Permasalahan yang masih dihadapi pada sasaran ini antara lain masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung (bangunan belum memiliki IMB) dan belum adanya kebijakan terkait Tenaga Ahli BG (TABG), Standar Layak Fungsi (SLF) dan pendataan bangunan gedung.
7. Sasaran : Meningkatnya kualitas bangunan dan lingkungan, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori. Permasalahan yang masih dihadapi pada sasaran ini antara lain penempatan lokasi pekerjaan belum berdasarkan skala prioritas berdasarkan *grand desain* yang telah ditentukan dan belum memiliki *masterplan* secara menyeluruh.
8. Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, tingkat capaian kinerja sebesar 99,94%. Permasalahan yang masih dihadapi pada sasaran ini antara lain belum optimalnya pemeliharaan jalan dan kelengkapan jalan seperti drainase, rendahnya kualitas konstruksi dan kerusakan jalan akibat bencana alam.
9. Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori. Permasalahan yang masih dihadapi pada sasaran ini antara ketaatan pelaku jasa konstruksi yang rendah dan penerapan sanksi yang belum tegas, regulasi jasa konstruksi belum diterapkan secara menyeluruh dan pembinaan terhadap pelaku jasa konstruksi masih rendah.
10. Sasaran : Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Permasalahan yang masih dihadapi pada sasaran ini antara lain belum berfungsinya TKPRD/BKPRD dalam upaya pengendalian ruang di Kabupaten Garut dan belum tersedianya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi secara menyeluruh untuk pengendalian ruang.

Selain permasalahan dalam capaian kinerja pelayanan tersebut di atas, permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi antara lain:

1. Kemantapan jalan belum mencapai target. Rendahnya kemantapan jalan terjadi oleh beberapa hal, antara lain:
  - a. belum optimalnya pemeliharaan jalan dan kelengkapan jalan seperti drainase;
  - b. rendahnya kualitas konstruksi;
  - c. belum fungsionalnya jalan-jalan baru;
  - d. masih terbatasnya kapasitas jalan menuju destinasi wisata;
  - e. masih terbatasnya kapasitas jalan menuju kawasan sentra pertanian;
  - f. masih terbatasnya kapasitas jalan menuju kawasan sentra ekonomi produktif lainnya.
2. Masih rendahnya dukungan sektor irigasi terhadap peningkatan produksi pertanian. Dampak dan dukungan sektor irigasi terhadap peningkatan produksi pertanian masih rendah, terjadi oleh beberapa hal, antara lain:
  - a. belum optimalnya upaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten;
  - b. belum optimalnya rehabilitasi jaringan irigasi kabupaten, terutama dalam menentukan lokasi prioritas;
  - c. pengendalian ruang dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.
3. Tingkat akses air minum belum mencapai target. Tingkat capaian akses air minum masih rendah dibandingkan dengan target *universal acces* sebesar 100%, terjadi oleh beberapa hal, antara lain:
  - a. pengelolaan pasca pembangunan tidak optimal, bahkan dalam beberapa kasus tidak dilakukan;
  - b. belum dilakukan potensi menjalin kerjasama dengan non pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Tingginya ketergantungan terhadap pembiayaan pemerintah menyebabkan tidak optimalnya kualitas pembangunan maupun kuantitas sumber air minum dan sanitasi;
  - c. belum optimalnya upaya perlindungan terhadap sumber air untuk kebutuhan air baku;
  - d. belum optimalnya kinerja kelembagaan pengelolaan air minum. baik segi sumber daya manusia maupun keandalan suatu kelembagaan tersebut;
  - e. belum memiliki lokasi prioritas dalam rencana pembangunan. Ada kalanya masih dilakukan *by project* tanpa dilakukan studi awal yang matang disesuaikan dengan kondisi lahan dan keterkaitan dengan sektor lainnya;
  - f. masih rendahnya kualitas air baku dan tidak meratanya kuantitas dan ketersediaan air baku.
4. Tingkat akses sanitasi belum mencapai target. Tingkat capaian akses sanitasi masih rendah dibandingkan dengan target *universal acces* sebesar 100%, terjadi oleh beberapa hal, antara lain:

- a. masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengelolaan air limbah;
  - b. belum berorientasi pada pengelolaan limbah skala kawasan;
  - c. angka BABS masih tinggi;
  - d. belum ada regulasi pengelolaan air limbah di tingkat kabupaten;
  - e. belum ada unit kerja khusus untuk pengelolaan air limbah.
5. Meningkatnya lokasi titik genangan dan banjir perkotaan. Mulai pesatnya pembangunan di Kabupaten Garut khususnya wilayahnya perkotaan terkadang tidak diiringi dengan pembangunan ruang terbuka hijau, perbaikan saluran dan pengelolaan persampahan, hal tersebut adakalanya menyebabkan mulai seringnya terjadi banjir perkotaan yang durasinya cukup lama walau curah hujan tidak terlalu tinggi. Selain hal tadi juga disebabkan oleh:
- a. belum optimalnya sistem drainase perkotaan;
  - b. belum optimalnya upaya mengurangi *run off* pada kawasan terbangun;
  - c. pengendalian ruang dan perizinan bangunan belum optimal dalam mengurangi *run off*.
6. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan. Hal lain yang menyebabkan penataan bangunan dan lingkungan belum optimal yaitu:
- a. masih banyaknya bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - b. belum optimalnya penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
  - c. masih rendahnya penerapan arsitektural bangunan gedung khas Kabupaten Garut;
  - d. masih rendahnya kualitas bangunan gedung pemerintah, yang akan digunakan sebagai percontohan bangunan gedung yang laik fungsi;
  - e. masih adanya bangunan gedung pemerintah yang belum fungsional.
7. Manajemen pelaksanaan konstruksi masih rendah. Sebagai *quality control* untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Namun hal ini kadang abai dilakukan sehingga terjadi permasalahan seperti gagal lelang, terlambatnya pekerjaan, lemahnya pengawasan di lapangan, sampai rendahnya kualitas pekerjaan yang dapat berakibat berurusan dengan masalah hukum.
8. Pemanfaatan dan pengendalian ruang, antara lain:
- a. Belum optimalnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. Belum optimalnya fungsi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Garut;
  - c. Belum tersedianya aspek legal (Perda) terkait Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang;
  - d. Belum adanya SDM Aparatur untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dalam hal ini belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Permasalahan dan hambatan tersebut di atas, berdampak terhadap capaian program, indikator kinerja utama dan visi misi kepala daerah serta program nasional. Berdasarkan analisis capaian kinerja pelayanan dan permasalahan, dibandingkan dengan target kinerja RPJMD dan nasional, capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih berada di bawah target, hal ini akan berdampak sangat signifikan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Capaian target kinerja yang harus menjadi fokus utama dalam penyusunan rencana kerja adalah pada bidang infrastruktur jalan, Sumber Daya Air, terutama pada pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi dengan target nasional/*universal acces* sebesar 100%.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta memperhatikan kondisi serta masukan dari berbagai *stakeholder* terkait, terdapat kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi masukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023 yaitu:

1. Kekuatan:
  - a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang sudah jelas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
  - b. Jumlah aparatur yang memadai;
  - c. Sarana dan prasarana yang dimiliki.
2. Kelemahan
  - a. Kualitas SDM masih belum merata dan memadai untuk bidang teknik khususnya Bidang Bina Marga dan Bidang Sumber Daya Air;
  - b. Masih lemahnya pelaporan dan evaluasi kinerja;
  - c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan asset;
  - d. Keberadaan data penyelenggaraan urusan belum optimal.
3. Peluang
  - a. Prioritas pembangunan yang terarah pada pembangunan infrastruktur dan pemenuhan layanan dasar (RPJMN, RPJMD, SPM, SDGs);
  - b. Pertumbuhan sektor pertanian, UMKM, pariwisata, dan pertambangan;
  - c. Pertumbuhan sektor konstruksi teknologi pelaksanaan konstruksi;
  - d. Berkembangnya teknologi informasi;
  - e. Aspek geopolitik;

- f. Ketersediaan layanan pengadaan barang dan jasa;
  - g. Ketersediaan tenaga ahli (akademisi/praktisi);
  - h. Potensi sumber-sumber pembiayaan infrastruktur (APBN, DAK, Bantuan Keuangan Provinsi).
4. Ancaman/Tantangan
- a. Pandemi Covid-19;
  - b. Peningkatan kebutuhan atas pangan/komoditas sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan);
  - c. Pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah;
  - d. Kualitas pelaksanaan konstruksi yang masih rendah;
  - e. Cuaca dan kondisi alam;
  - f. Kesiapan lahan dan masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi;
  - g. Penurunan pendapatan daerah;
  - h. Dampak lingkungan akibat pelaksanaan konstruksi;
  - i. Dinamika usulan/permintaan pembangunan infrastruktur daerah.

Hasil analisis perkembangan dan masalah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan memperhatikan perkembangan isu-isu penting yang dapat menjadi catatan strategis sebagai tindak lanjut dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 antara lain:

1. Peningkatann konektivitas dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi dan peningkatan produktifitas;
2. Pembangunan infrsastruktur pada kawasan potensi ekonomi;
3. Peningkatan pengelolaan irigasi untuk peningkatan indeks pertanaman;
4. Optimalisasi program padat karya dan swakelola pengadaan jasa konstruksi dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan terdampak Pandemi Covid-19;
5. Jaminan kepastian investasi sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
6. Penyediaan pelayanan air minum yang aman dan air limbah yang layak dalam upaya penanganan kemiskinan, stunting, penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
7. Pengurangan risiko bencana dan penanganan pasca bencana;
8. Optimalisasi pelayanan sertifikasi laik fungsi, perizinan dan rekomendasi bangunan; dan
9. Optimalisasi pengendalian kualitas pembangunan melalui pemenuhan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Garut**

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

terkait dengan prioritas program, kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan awal RKPD. Hal ini ditujukan untuk menjaga kesesuaian/konsistensi antara RKPD dan Rencana Kerja.

Proses review dan penajaman program dan kegiatan tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan hasil pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah, arahan Bupati dan Wakil Bupati, hasil pelaksanaan penjaringan usulan Musrenbang Kabupaten, serta pokok pikiran DPRD.

Pada pelaksanaan penajaman dan finalisasi rencana kerja, tidak terdapat perubahan Program dan Kegiatan, sedangkan dalam Sub Kegiatan terdapat pengurangan. Perubahan Sub Kegiatan tersebut ditujukan untuk optimalisasi dalam pencapaian kinerja yang direncanakan, hal ini dilakukan untuk pencapaian target Renstra yang sampai dengan tahun 2021 dan proyeksi 2022 target capaian masih rendah.

Perubahan pagu indikatif yang terdapat pada rancangan awal RKPD sebesar Rp1.268.391.537.600,00 berubah menjadi Rp457.822.572.237,00, terjadi karena penyesuaian perkiraan pagu/indikasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta dengan mempertimbangkan optimalisasi pencapaian target dan rasionalisasi/logis dalam kebutuhan pagu belanja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penganggaran tahun-tahun sebelumnya. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD sebagai berikut:

Tabel 2.9  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023  
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Lembar : 1 dari 25

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	35.958.600.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	34.456.252.037	
			Nilai Evaluasi SAKIP	BB Nilai				Nilai Evaluasi SAKIP	BB Nilai		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Sesuai Ketentuan	100%	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Sesuai Ketentuan	100%	9.914.200	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.961.400	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.952.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>31.290.100.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>31.290.086.400</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3336 Orang/bulan	31.285.100.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3336 Orang/bulan	31.285.100.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.986.400	
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>450.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>449.841.927</b>	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	450.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	449.841.927	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.006.500.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.001.885.200</b>	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.243.200	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	275.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	274.493.000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	149.920.600	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	70.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	67.578.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	92.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	91.695.200	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	405.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	404.955.200	
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.640.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>174.923.000</b>	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18 Unit	1.465.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	175.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	174.923.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	430.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	427.970.310	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	220.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	219.997.160	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	23.148.200	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	185.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	184.824.950	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.132.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.101.631.000</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	124 Unit	132.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	124 Unit	131.450.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	124 Unit	575.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	545.915.000	
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	425.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	424.266.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	84,40%	170.450.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	84,40%	17.342.000.000	
			Persentase Tampung Air yang Tersedia	82,54%				Persentase Tampung Air yang Tersedia	82,54%		
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tampung Air Baku yang Dibangun	17 Unit	95.250.000.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tampung Air Baku yang Dibangun	3 Unit	12.142.000.000	
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	10 Dokumen	1.000.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	-	-	
2	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	10 Unit	17.500.000.000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	-	-	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	3 Titik	7.500.000.000	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	846.000.000	
4	Pembangunan Tanggul Sungai	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	14 Km	51.000.000.000	Pembangunan Tanggul Sungai	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,50 Km	2.396.000.000	
5	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	1 Unit	8.000.000.000	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	2 Unit	5.900.000.000	
6	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	10 Km	5.000.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	10 Km	1.000.000.000	
7	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	3 Unit	5.000.000.000	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	1 Unit	2.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	250.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	
2	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Panjang Jaringan Irigasi yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dioperasikan &amp; Dipelihara</b>	<b>116 Km</b>	<b>75.200.000.000</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Panjang Jaringan Irigasi yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dioperasikan &amp; Dipelihara</b>	<b>105,20 Km</b>	<b>5.200.000.000</b>	
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	-	-	
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	11 Km	65.000.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,187 Km	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	105 Km	10.000.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	105 Km	5.000.000.000	
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>		<b>Cakupan Air Minum Layak</b>	<b>90,04%</b>	<b>90.100.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>		<b>Cakupan Air Minum Layak</b>	<b>90,04%</b>	<b>9.446.000.000</b>	
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Kegiatan SPAM</b>	<b>11400 SR</b>	<b>90.100.000.000</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Kegiatan SPAM</b>	<b>2582 SR</b>	<b>9.446.000.000</b>	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang Disusun	4 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang Disusun	-	-	
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	8000 SR	57.000.000.000	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1612 SR	7.446.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Kegiatan Peningkatan SPAM	3300 SR	15.000.000.000	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Kegiatan Peningkatan SPAM	-	-	
4	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	5 Kelompok Masyarakat	200.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	-	-	
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Kegiatan Perluasan SPAM	1000 SR	17.600.000.000	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Kegiatan Perluasan SPAM	970 SR	2.000.000.000	
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>		<b>Cakupan Sanitasi Layak</b>	<b>68,11%</b>	<b>39.900.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>		<b>Cakupan Sanitasi Layak</b>	<b>68,11%</b>	<b>7.701.000.000</b>	
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Rumah Tangga yang Mempunyai Pengolahan Air Limbah Domestik</b>	<b>3600 Rumah Tangga</b>	<b>39.900.000.000</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Rumah Tangga yang Mempunyai Pengolahan Air Limbah Domestik</b>	<b>1168 Rumah Tangga</b>	<b>7.701.000.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	-	-	
2	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	2850 Rumah Tangga	25.000.000.000	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1168 Rumah Tangga	7.701.000.000	
3	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1400 Rumah Tangga	14.700.000.000	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	-	-	
V	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>		<b>Persentase Penurunan Luas Genangan Air</b>	<b>25%</b>	<b>40.100.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>		<b>Persentase Penurunan Luas Genangan Air</b>	<b>25%</b>	<b>3.790.000.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Panjang Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Direhab dan Dibangun</b>	<b>26000 M</b>	<b>40.100.000.000</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Panjang Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Direhab dan Dibangun</b>	<b>2495 M</b>	<b>3.790.000.000</b>	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	-	-	
2	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	11000 M	25.000.000.000	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	920 M	2.000.000.000	
3	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	15000 M	15.000.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1575 M	1.790.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VI	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		<b>Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis dan Fungsi</b>	<b>9,45%</b>	<b>80.750.000.000</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		<b>Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis dan Fungsi</b>	<b>9,45%</b>	<b>69.150.000.000</b>	
1	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>		<b>Jumlah Bangunan Gedung yang Memenuhi Klasifikasi Bangunan</b>	<b>105 Unit</b>	<b>80.750.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>		<b>Jumlah Bangunan Gedung yang Memenuhi Klasifikasi Bangunan</b>	<b>111 Unit</b>	<b>69.150.000.000</b>	
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	105 Dokumen	500.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	105 Dokumen	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	80.000.000.000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	68.500.000.000	
3	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	100 Dokumen	200.000.000	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	100 Dokumen	100.000.000	
4	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VII	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>		<b>Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata</b>	<b>20%</b>	<b>26.050.000.000</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>		<b>Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata</b>	<b>20%</b>	<b>18.488.600.000</b>	
1	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya</b>	<b>4 Kawasan</b>	<b>26.050.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya</b>	<b>4 Kawasan</b>	<b>18.488.600.000</b>	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.000.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	4 Kawasan	25.000.000.000	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	4 Kawasan	18.488.600.000	
3	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	50.000.000	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	-	-	
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>		<b>Persentase Kemantapan Jalan</b>	<b>55,27%</b>	<b>776.682.937.600</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>		<b>Persentase Kemantapan Jalan</b>	<b>55,27%</b>	<b>293.452.720.200</b>	
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan yang Dibangun, Direkonstruksi, Direhabilitasi dan Dipelihara	590 Km	776.682.937.600	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan yang Dibangun, Direkonstruksi, Direhabilitasi dan Dipelihara	750,06 Km	293.452.720.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	19 Dokumen	2.118.875.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	7 Dokumen	728.606.200	
2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	10000 M <sup>2</sup>	65.000.000.000	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	48511 M <sup>2</sup>	61.900.000.000	
3	Pembangunan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan yang Dibangun	20 Km	75.000.000.000	Pembangunan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan yang Dibangun	44,57 Km	39.860.000.000	
4	Rekonstruksi Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	306 Km	426.340.322.600	Rekonstruksi Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	89,25 Km	104.034.400.000	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Rehabilitasi Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	99 Km	70.500.000.000	Rehabilitasi Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	26,27 Km	21.065.000.000	
6	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	400 Km	20.000.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	590 Km	17.000.000.000	
7	Pembangunan Jembatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jembatan yang Dibangun	1000 M	100.000.000.000	Pembangunan Jembatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jembatan yang Dibangun	3085,66 M	46.264.714.000	
8	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	375 M	15.000.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	-	-	
9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	160 M	900.000.000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	194 M	900.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	2,03 Km	1.623.740.000	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	775 Km	1.500.000.000	
11	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	100.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	100.000.000	
12	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	100.000.000	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	100.000.000	
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Terlatih dan Bersertifikat	27,24%	3.000.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Terlatih dan Bersertifikat	27,24%	2.000.000.000	
			Persentase Proyek Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100%				Persentase Proyek Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100%		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan dan Tersertifikasi	120 Orang	1.100.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan dan Tersertifikasi	120 Orang	750.000.000	
1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	60 Orang	400.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	60 Orang	400.000.000	
2	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	60 Orang	700.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	60 Orang	350.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Data dan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	6 Dokumen	1.500.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Data dan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	10 Dokumen	1.050.000.000	
1	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	350.000.000	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	150.000.000	
2	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	2 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	2 Dokumen	200.000.000	
3	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	1 Dokumen	700.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	4 Dokumen	450.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	2 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	3 Dokumen	250.000.000	
3	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>		<b>Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>400.000.000</b>	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>		<b>Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>200.000.000</b>	
1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	400.000.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
X	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>		<b>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang</b>	<b>84%</b>	<b>5.400.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>		<b>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang</b>	<b>84%</b>	<b>1.996.000.000</b>	
1	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Dokumen Penetapan RTRW dan RRTR</b>	<b>19 Dokumen</b>	<b>4.600.000.000</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Dokumen Penetapan RTRW dan RRTR</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>1.223.000.000</b>	
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	10 Dokumen	4.000.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	836.500.000	
2	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	9 Dokumen	600.000.000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	386.500.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>400.000.000</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>386.500.000</b>	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	400.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	386.500.000	
3	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>400.000.000</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>386.500.000</b>	
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	400.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	386.500.000	
<b>TOTAL</b>					<b>1.268.391.537.600</b>	<b>TOTAL</b>					<b>457.822.572.237</b>

Sumber : SIPD dan Rentra Dinas PUPR Tahun 2019-2024

## **2.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Program kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah dilakukan melalui proses Musrenbang dan melalui aspirasi langsung yang disampaikan kepada Bupati. Aspirasi masyarakat yang disampaikan dipertajam berdasarkan data teknis dan kelengkapan administrasi lainnya untuk selanjutnya menjadi bahan review rencana kerja. Pengusulan melalui proses Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD, dilakukan melalui verifikasi bersama Bappeda. Selanjutnya dipertajam dengan mempertimbangkan fokus prioritas, isu-isu strategis, tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan ketersediaan anggaran. Seluruh usulan masyarakat telah memiliki keterkaitan dan konsisten dengan isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat sebagai berikut:



Tabel 2.10  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>				
1	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku		Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	
		1 Kp.Ketot Ds. Cisaat Kec.Kadungora		1 Titik	Pemenuhan SPM Air Bersih
		2 Kp. Warutilu RW 04 Ds. Ciburial Kec. Leles		1 Titik	Pemenuhan SPM Air Bersih
		3 RT 03/05 Ds. Tanjungsari Kec. Karangpawitan		1 Titik	Pemenuhan SPM Air Bersih
		4 Kp. Ciburuy RT 08/01 Ds. Cipaganti Kec. Cisurupan		1 Titik	Pemenuhan SPM Air Bersih
		5 Babakan Sukasari Ds. Mekarmukti Kec. Cilawu		1 Titik	Pemenuhan SPM Air Bersih

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Pembangunan Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,50 Km	
		1 SUB DAS/TPT Cirujit --> Dekat Sekolah SDN I Wanaraja		0,42 Km	Melindungi Daerah di Sekitar Sungai
		2 DAS Kp.Pintuan Ds. Karangmulya Kec.Kadungora		0,04 Km	Melindungi Daerah di Sekitar Sungai
		3 DAS Kp. Cikaso RT 02 RW 02 Ds. Padaasih Kec. Pasirwangi		0,04 Km	Melindungi Daerah di Sekitar Sungai
3	Pembangunan Polder/Kolam Retensi		Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	2 Unit	
		1 Polder/Kolam Retensi Cibudug		1 Unit	Menyesuaikan Ketersediaan Anggaran
		2 Polder/Kolam Retensi Cirumput		1 Unit	Program/Kegiatan Lanjutan
		3 Pembebasan Tanah Polder/Kolam Retensi Cirumput		1 Paket	Program/Kegiatan Lanjutan
4	Normalisasi/Restorasi Sungai		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	76 Km	
		1 Sub DAS Badama Hilir Kec. Tarogong Kidul		5 Km	Menjaga Kebersihan Sungai
		2 Sub DAS Badama Kec. Tarogong Kidul		5 Km	Menjaga Kebersihan Sungai
		3 Sub DAS Cigarut Kec. Garut Kota		5 Km	Menjaga Kebersihan Sungai
		4 Sub DAS Cigulampeng Kec. Garut Kota		5 Km	Menjaga Kebersihan Sungai
		5 Sub DAS Cikatel Kec. Tarogong Kaler		10 Km	Menjaga Kebersihan Sungai
		6 Sub DAS Cimanuk Hulu Kec. Cikajang		6 Km	Menjaga Kebersihan Sungai

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7 Sub DAS Cimanuk Kec. Bayongbong, Garut Kota		4 Km	Menjaga Kebersihan Sungai
		8 Sub DAS Ciojar Hilir Kec. Banyuresmi		4 Km	Menjaga Kebersihan Sungai
		9 Sub DAS Ciojar Hulu Kec. Tarogong Kaler		4 Km	Menjaga Kebersihan Sungai
		10 Sub DAS Ciwalen Kec. Garut Kota		5 Km	Menjaga Kebersihan Sungai
		11 Sub DAS Cibuyutan Kec. Banyuresmi		4 Km	Menjaga Kebersihan Sungai
		12 Sub DAS Cikuda Kec. Pameungpeuk		10 Km	Menjaga Kebersihan Sungai
		13 Sub DAS Cilauteureun Kec. Cikelet		5 Km	Menjaga Kebersihan Sungai
		14 Sub DAS Citameng Kec. Sukawening		4 Km	Menjaga Kebersihan Sungai
5	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air		Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	1 Unit	
		1 Mata Air Cihaneut Ds. Parakan. Kec. Samarang		1 Unit	Melindungi Sumber Air Baku
2	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,187 Km	
		1 Irigasi Ds. Tanjungsari Kec. Karangpawitan		0,187 Km	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	105 Km	
		1 Jaringan Irigasi Cipeujeuh			
		2 Jaringan Irigasi Cimaragas			
		3 Jaringan Irigasi Cisangkan			
		4 Jaringan Irigasi Badama			
		5 Jaringan Irigasi Cikamiri II			
		6 Jaringan Irigasi Cibuyutan Selatan			
		7 Jaringan Irigasi Ciojar			
		8 Jaringan Irigasi Parigi			
		9 Jaringan Irigasi Beulahnangka			
		10 Jaringan Irigasi Ciroyom			
		11 Jaringan Irigasi Cikamiri			
		12 Jaringan Irigasi Cibuyutan Utara			
		13 Jaringan Irigasi Citikey			
		14 Jaringan Irigasi Cipancar			
		15 Jaringan Irigasi Cimarijawa			
		16 Jaringan Irigasi Cisalak			
		17 Jaringan Irigasi Citameng I			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		18 Jaringan Irigasi Citameng I			
		19 Jaringan Irigasi Citameng II			
		20 Jaringan Irigasi Citameng III			
		21 Jaringan Irigasi Citameng IV			
		22 Jaringan Irigasi Cipacing			
		23 Jaringan Irigasi Cianten			
		24 Jaringan Irigasi Cibedug			
		25 Jaringan Irigasi Leuwibolang			
		26 Jaringan Irigasi Baranangsiang			
		27 Jaringan Irigasi Cadasgantung			
		28 Jaringan Irigasi Cimanuk			
		29 Jaringan Irigasi Cikuray			
		30 Jaringan Irigasi Simpangsari			
		31 Jaringan Irigasi Sindujaya			
		32 Jaringan Irigasi Leuwibitung			
		33 Jaringan Irigasi Ciawi			
		34 Jaringan Irigasi Curuggebul			
		35 Jaringan Irigasi Cirompang			
		36 Jaringan Irigasi Cipandan			
		37 Jaringan Irigasi Cijayana			
		38 Jaringan Irigasi Cipancong			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>				
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1612 SR	
		1 Ds. Margahayu Kec. Leuwigoong		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		2 Ds. Cisarua Kec. Samarang		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		3 Ds. Margahayu Kec. Leuwigoong		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		4 Ds. Cisarua Kec. Samarang		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		5 Ds. Pangeureunan Kec. Limbangan		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		6 Ds. Jangkurang Kec. Leles		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		7 Ds. Jagabaya Kec. Mekarmukti		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		8 Ds. Surabaya Kec. Limbangan		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		9 Kp. Lumbung dan Kp. Darmaga Ds. Cigintung Kec. Singajaya		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		10 Ds. Kertajaya Kec. Cibatu		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		11 Kp. Pasir Awi Rt. 03/04 Ds. Sukamulya Kec. Talegong		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		12 Kp. Balong Ds. Gandamekar Kec. Kadungora		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		13 Kp. Bebedahan Ds. Ciburuy Kec. Bayongbong		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		14 Kp. Kadunenggang Ds. Mekarwangi Kec. Talegong		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		15 Kp. Tajur RW. 1,2,3 Ds. Sukamenak Kec. Wanaraja		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		16 Ds. Simpen Kaler Kec. Bl. Limbangan		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		17 Kp. Simurugul RW. 09 Ds. Margawati Kec. Garut Kota		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		18 Kp. Karang Tengah Ds. Sinarjaya Kec. Bungbulang		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		19 Kp. Caringin Lebak Ds. Tanjungsari Kec. Karangpawitan		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		20 Kp. Pasawahan RW. 02 Kelurahan Pananjung Kec. Tarogong Kaler		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		21 Kp. Bebedahan Ds. Cisarua Kec. Samarang		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		22 Perum Pasirlingga Indah Ds. Jati Kec. Tarogong Kaler		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		23 Kp. Neglasari Ds. Sukasono Kec. Sukawening		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		24 Ds. Cipaganti Kec. Cisarupan		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		25 Ds. Mekarwangi Kec. Cibalong		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		26 RW. 03 dan RW. 04 Ds. Sukarasa Kec. Pangatikan		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		27 Kp. Cileungsing RW. 08 Ds. Margahayu Kec. Leuwigoong		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		28 Kp. Babakan Jati Ds. Peundeuy Kec. Peundeuy		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		29 Kp. Cinagrog Ds. Peundeuy Kec. Peundeuy		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		30 Kp. Pacing-Kalangsari Ds. Peundeuy Kec. Peundeuy		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		31 Kp. Tutugan RW. 04 Ds. Purwajaya Kec. Peundeuy		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		32 Kp. Cigagak Rt. 01 Rw. 05 Ds. Sukaratu Kec. Banyuresmi		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		33 RW. 13 Ds. Sindangsari Kec. Cigedug Cigedug		44 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		34 Kp. Patrol Ds. Margahayu Kec. Leuwigoong Leuwigoong		80 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		35 Kp. Sukajadi RT.03 RW.01 Ds. Mekarsari Kec. Mekarmukti		80 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Kegiatan Perluasan SPAM	970 SR	
		1 Ds. Cisaat Kec. Kadungora		97 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		2 Ds. Cibatu Kec. Cibatu		97 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		3 Ds. Karangmulya Kec. Malangbong		97 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		4 Ds. Margaluyu Kec. Leles		97 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		5 Ds. Mekargalih Kec. Tarogong Kidul		97 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		6 Ds. Sukamulya Kec. Sukaesmi		97 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		7 Ds. Sukawangi Kec. Tarogong Kaler		97 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		8 Ds. Pamekarsari Kec. Banyuresmi		97 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		9 Ds. Cikarag Kec. Malangbong		97 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting
		10 Ds. Sindangsari Kec. Cigedug		97 SR	Rawan Air, AKI/AKB dan Stunting



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>				
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1168 Rumah Tangga	
		1 Penyediaan Kloset Jongkok (Kab. Garut)		5000 Unit	Sanitasi Penguatan ODF
		2 P2WKSS (pengadaan infras : Sanitasi)		17 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		3 Kel. Kotakulon Kec. Garut Kota		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		4 Kel. Kotawetan Kec. Garut Kota		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		5 Kel. Sukamentri Kec. Garut Kota		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		6 Kel. Margawati Kec. Garut Kota		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		7 Kel. Cimuncang Kec. Garut Kota		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		8 Kel. Regol Kec. Garut Kota		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		9 Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		10 Kel. Paminggir Kec. Garut Kota		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		11 Kel. Muarasanding Kec. Garut Kota		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		12 Ds. Tanjung Kamuning Kec. Tarogong kaler		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		13 Kp. Segleng Ds. Sukarame Kec. Leles		17 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		14 Kp. Simpen pojok RW.06 Ds. Simpen Kaler Kec. Bl. Limbangan		17 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		15 Kp. Sukamulya Rw.03 dan Kp. Babakan Cipari RW.04 Ds. Sukarasa Kec. Pangatikan		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		16 Kp. Sukaasih RW.11 Ds. Gandamekar Kec. Kadungora		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		17 Kp. Babakan Jati RW.08 Ds. Gandamekar Kec. Kadungora		17 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		18 Kp. Cileungsing RW.08 Ds. Margahayu Kec. Leuwigoong		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		19 Kp. Patrol RW.11 Ds. Margahayu Kec. Leuwigoong		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		20 Kp. Hangasa Hilir RW.02 Ds. Gandamekar Kec. Kadungora		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		21 Ds. Mekarsari Kec. Cibatu		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		22 Ds. Lengkongjaya Kec. Karangpawitan		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		23 Ds. Wanamekar Kec. Wanaraja		17 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		24 Ds. Sukarasa Kec. Pangatikan		17 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		25 RT 03 RW 04 Ds. Pangrumasan Kec. Peundeuy		17 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		26 Kp. Cilimus RT 05 RW 11 Ds. Sukatani Kec. Cisarupan		17 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		27 Kp. Babakan Gagajunti RW 11 Ds. Hegarsari Kec.Kadungora		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		28 Kp. Ladatdae RW 7 Ds. Hegarsari Kec.Kadungora		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		29 Kp. Gagajunti RW 8 Ds. Hegarsari Kec.Kadungora		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		30 Kp. Malaka RW 3 Ds. Hegarsari Kec.Kadungora		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		31 Kp. Nusa RW 10 Ds. Hegarsari Kec.Kadungora		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		32 Kp.Haurkuning RW 04 Ds. Hegarsari Kec.Kadungora		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		33 Kp.Cihaur RW 06 Ds. Hegarsari Kec.Kadungora		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		34 Kp. Naringgul RW 05 Ds. Hegarsari Kec.Kadungora		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		35 Kp.Haurkuning Wetan RW 12 Ds. Hegarsari Kec.Kadungora		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		36 Kp.Kerenceng RW 02 Ds. Hegarsari Kec.Kadungora		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		37 Kp.Hegarsari RW 01 Ds. Hegarsari Kec.Kadungora		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		38 Kp.Balubur RT 03 RW 09 Ds. Hegarsari Kec.Kadungora		35 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
		39 Kp. Ciudian Rt 01 Rw 01 Ds. Ciudian Kec. Singajaya		17 RT	Rawan Sanitasi, AKI/AKB dan Stunting
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>				
<b>1</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan		Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	920 M	
		1 Blok SOR Ciateul Kec. Tarogong Kidul		920 M	Program/Kegiatan Lanjutan
2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1575 M	
		1 Kp. Ciminim RW 05 Ds. Mekartani Kec. Cibalong		175 M	Pengendalian Banjir/Genangan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2 Blok Cibuntu Ds. Pangrumasan Kec. Peundeuy		175 M	Pengendalian Banjir/Genangan
		3 Kp. Cihanja RW 02 Ds. Lingkungpasir Kec. Cibiuk		175 M	Pengendalian Banjir/Genangan
		4 Kp. Karikil RW 11 Ds. Sukatani Kec. Cisurupan		175 M	Pengendalian Banjir/Genangan
		5 Kp. Simpangsari RT 02 Rw 03 Ds. Mekarsari Kec. Cibalong		175 M	Pengendalian Banjir/Genangan
		6 Kp. Babakan Galumpit Ds. Rancasalak Kec. Kadungora		175 M	Pengendalian Banjir/Genangan
		7 Kp. Ciela Lebak RT 02 RW 03 Ds. Ciela Kec. Bayongbong		175 M	Pengendalian Banjir/Genangan
		8 Blok Nangoh Ds. Rancasalak Kec. Kadungora		175 M	Pengendalian Banjir/Genangan
		9 RW 07 Kp. Negla Ds. Peundeuy Kec. Peundeuy		175 M	Pengendalian Banjir/Genangan
5	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>				
1	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>				
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		1	Bangunan Aquatic Kec. Tarogong Kidul		1 Dokumen	Program/Kegiatan Lanjutan
		2	Bangunan Stadion Sepakbola Kec. Tarogong Kidul		1 Dokumen	Program/Kegiatan Lanjutan
		3	Rekonstruksi Gedung KORPRI untuk sarana publik		1 Dokumen	Gedung KORPRI yang Sudah Lama Terbengkalai Dimanfaatkan untuk Sarana Publik
		4	Mess PUPR		1 Dokumen	Masih Belum Fungsional
		5	Pembangunan Gedung UPT Peralatan dan Perbengkelan Dinas PUPR Kab. Garut		1 Dokumen	
		6	Pembangunan Gedung Kantor DPUPR		1 Dokumen	
		7	Kantor Kec. Sucinaraja, Kec. Pangatikan dan Kec. Karangtengah		1 Paket	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>					
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>					

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	4 Kawasan	
		1	SOR (RTH. Parkir. DPT)		Program/Kegiatan Lanjutan
		2	Kawasan Islamic Centre Kab. Garut		Program/Kegiatan Lanjutan
		3	Penataan Alun-alun Wanaraja		Program/Kegiatan Lanjutan
		4	Batas Kabupaten Garut - Kabupaten Cianjur ( Kec. Caringin )		Program/Kegiatan Lanjutan
		5	Batas Kabupaten Garut - Kabupaten Sumedang ( Kec. Malangbong )		
		6	Batas Kabupaten Garut - Kabupaten Sumedang ( Kec. Selaawi )		
		7	Batas Kabupaten Garut - Kabupaten Bandung ( Kec. Talegong )		
		8	Kantor Kec. Banjarwangi		
		9	Koridor jalan dewi sartika, jalan pasar baru		
		10	Tugu Simpang Kubang		
		11	Pedestrian simpang maktal dan simpang lima		
		12	Asrama Kodim 0611/Garut Kel. Kota Kulon Garut Kota		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		13 Markas Denpom III/2 Garut Kel. Pakuwon Garut Kota			
		14 Pondok Pesantren Al-Huda Sanding (YASDA) Kp. Sanding RT 02 RW 01 Ds. Girimakmur Kec. Malangbong			
		15 Sarana Pendidikan Al Hidayah Kp. Ciawi Rt 02 RW 08 Ds. Lingsungpasir Kec. Cibiuk			
		16 Pembangunan Renovasi Sarana Madrasah Yayasan Al-Hikmah Bina Amanah (YABINA) Kp. Pogor RT 04 RW 06 Ds. Cintarasa Kec. Samarang			
		17 Pembangunan Gedung Kelas Baru Madrasah Diniyah Al-Ihsan Kp. Sirnahurip RT 03 Rw 04 Ds. Cintarasa Kec. Samarang			
		18 Pembangunan Asrama Ponpes Al-Ijma Yayasan Islam Bani Salim Kp. Cilemah Ds. Cintaasih Kec. Samarang			
		19 Pembangunan MDT Al-Muhajirin Kp. Kayujati RW 08 Ds. Sirnasari Kec. Samarang Ds. Sirnasari Kec. Samarang			
		20 Pembangunan Gedung Perdagangan Cabang Syarikat Islam Ds. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul			
		21 Renovasi/Perbaikan Madrasah As Shofar Kp. Pasanggrahan RT 02 RW 05 Ds. Kersamanah Kec. Kersamanah			
		22 Pembangunan Madrasah Al-Djihad Yayasan Badan Penyelenggara Pendidikan Islam (BPPI) Bina Syari Kp. Lemburpanjang RT 03 RW 01 Ds. Cimaragas Kec. Pangatikan			
		23 Pembangunan Ruang Belajar Yayasan Al-Muhajirin Bumi Pasanggrahan Indah Ds. Pasanggrahan Kec. Cilawu			
		24 Pembangunan Pesantren Riyadul Huda Yayasan Riyadul Huda Kp. Muncang Agung RT 03 RW 08 Ds. Malangbong Kec. Malangbong			
		25 Pembangunan Sekretariat Yayasan Alamy Indonesia for Humanity Perum Bumi Malayu Asri Blok A No. 5 Ds. Mekarwangi Kec. Tarogong Kaler			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		26	Pembangunan Asrama Bahrudin Yayasan Al Falah Birru Kp. Alfalah RT 03 RW 06 Ds. Mekargalih Kec. Tarogong Kidul		
		27	Pembangunan Madrasah Patahul Huda Kp. Cicolak Rt 2 Rw 4 Ds. Peundeuy Kec. Peundeuy		
		28	Pembangunan Madrasah/Mesjid Arrahman Kp. Cogreg Rt 1 Rw 3 Ds. Tanjungsari Kec. Karangpawitan		
		29	Pembangunan Mesjid/Madrasah Al-Ikhlas Kp. Cileungsi Rt 2 Rw 8 Ds. Margahayu Kec. Leuwigoong		
		30	Pembangunan Madrasah Nurul Iman Kp. Mularajeun Tanjakan Ds. Mekarmukti Kec. Cilawu		
		31	Rehab Mesjid Darul Fatah Kp. Cireundeu Rt1 Rw 13 Ds. Godong Kec. Karangpawitan		
		32	Pembangunan Mesjid Al-hikmah Kp. Gandasari Rt 02 Rw 01 Ds. Mangkurayat Kec. Cilawu		
		33	Pembangunan Mesjid Al-Muhajirin Kp. Dangdeur Rt 03 Rw 01 Ds. Jatiwangi Kec. Pakenjeng		
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>				
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>				
1	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	48511 M <sup>2</sup>	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1 Jalan Sadang-Cempaka (GSW)		28213 M <sup>2</sup>	Jalan Alternatif, Menghindari Kemacetan Akibat Pertumbuhan Perkotaan
		2 Jalan Cimaragas Gandasari 1.9 km x 25 m = 20 M		15673 M <sup>2</sup>	Jalur Lingkar Luar Garut sebagai Bagian dari Perpres
		3 Jalan Darussalam - Cioray		3134 M <sup>2</sup>	
		4 Jalan Pamegatan - Singajaya STA 7+250 (Blok Lemah Luhur)		313 M <sup>2</sup>	Jalan Alternatif Menghindari Jalur yang Rawan Amblas
		5 Jalan Alternatif Talegong - Selaawi Kp. Ciwaru Ds. Sukamulya Kec. Talegong		783 M <sup>2</sup>	Jalan Alternatif Menghindari Jalur yang Rawan Amblas
		6 Pembebasan Lahan Jalan By Pass II		391 M <sup>2</sup>	Jalur Lingkar Luar Garut sebagai Bagian dari Perpres
2	Pembangunan Jalan		Panjang Jalan yang Dibangun	44,57 Km	
		1 Jalan Pangatikan-Sucinaraja (GSW)		5 Km	
		2 Jalan Cibentang - Ciwangi - Pangeureunan Kec. Limbangan		7,6 Km	Program/Kegiatan Lanjutan
		3 Jalan Peunclut - Gunung Peer		4,5 Km	Program/Kegiatan Lanjutan
		4 Jalan Poros Tengah Cilawu - Banjarwangi		3 Km	Program/Kegiatan Lanjutan
		5 Jalan Produksi Pertanian Kec. Bayongbong		4,7 Km	Program/Kegiatan Lanjutan
		6 Jalan Ds. Akses Sirkuit Ampel Ds. Sukabakti Tarogong Kaler		4,7 Km	
		7 Jalan Angkrong - Garumukti ke Pandawa Pamulihan		3 Km	Jalan Penghubung antar Kecamatan
		8 Jalan Pangradegan - Wates Pamulihan ke Gunung Jampang Bungbulang		8 Km	Jalan Penghubung antar Kecamatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		9 Jalan Poros Cipeuteuy - Jungkeuyang Kel. Margawati kel. Garut Kota		1,32 Km	Jalan Penghubung antar Kecamatan
		10 Jalan Poros Kec. : Tanjungkarya - Panjiwangi		0,35 Km	Jalan Penghubung antar Kecamatan
		11 Jalan Alternatif Kp. Ciwaru Ds. Sukamulya Kec. Talegong		0,24 Km	
		12 Jalan Akses Wisata Leuwi Jubleg Ds. Cihikeu Kec. Bungbulang		0,24 Km	Jalan Menuju Akses Wisata
		13 Jalan Akses Wisata Cikaso Puncak Guha Ds. Sirnajaya Kec. Bungbulang		0,24 Km	Jalan Menuju Akses Wisata
		14 Jalan Akses Wisata Situ Kabuyutan Ds. Bojong Kec. Bungbulang		0,24 Km	Jalan Menuju Akses Wisata
		15 Jalan Akses Wisata Cibungaok Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang		0,24 Km	Jalan Menuju Akses Wisata
		16 Jalan Ds. Wangunjaya - Sirnajaya Kec. Bungbulang		0,24 Km	Jalan Penghubung antar Desa
		17 Jalan Mekarbakti - Gn. Jampang Ds. Mekarbakti Kec. Bungbulang		0,24 Km	
		18 Jalan Tarikolot Ds. Sukajaya Kec. Sukaresmi		0,24 Km	
		19 Jalan Blok Nyampay Kec. Cikajang		0,24 Km	
		20 Jalan Kp. Campedak Ds. Sukaresmi		0,24 Km	
3	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	89,25 Km	
		1 Jalan Caringin - Indralayang		8,86 km	
		2 Ruas Jalan Kiarakohok - Linggamanik Kec. Cikelet		4 Km	
		3 Rehabilitasi Jalan Cihuni-Cibatu		7 Km	
		4 Ruas Jalan Tarogong - Samarang Kec. Tarogong Kaler. Samarang		6 Km	
		5 Jalan Simpang - Sagara - Cibalong		3,74 Km	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6 Jalan Pamalayan - Cicariu -Cikarang Kec. Cisewu		2,6 Km	
		7 Jalan TWA Papandayan		2,85 Km	
		8 Ruas Jalan Cikajang - Cipondok		2,43 Km	
		9 Ruas Jalan Tarogong-Samarang Kec. Samarang		2,43 Km	
		10 Jalan Karangpawitan - Wanaraja Kec. Sucinaraja. Wanaraja		1,18 Km	
		11 Jalan Panunjuk - Pasirwangi Kec. Pasirwangi		1,18 Km	
		12 Jalan Puncakhamerang - Coblosan Kec. Cisewu		1,25 Km	
		13 Jalan Aruji Kec. Tarogong Kidul		0,55 Km	
		14 Jalan Garut - Karangpawitan - Wanaraja - Sukawening		4 Km	
		15 Penguatan Infrastruktur Desa		8 Km	
		16 Jalan Ds. Cikelet - Ds. Tipar Kec. Cikelet		3,58 Km	
		17 Jalan Menuju Wisata Pabrik Teh Belanda Ds. Margamulya Cikajang		1 Km	
		18 Jalan Ds. Linggamanik - Karangsari Kec. Cikelet		0,8 Km	
		19 Jalan Menuju Kec. Banjarwangi		0,3 Km	
		20 Jalan Lintas Ds. Mekarmulya & Ds. Karangmulya Kec. Malangbong		1 Km	
		21 Jalan Cikarag Ds. Cikarag Kec. Malangbong		2 Km	
		22 Jalan Bojong-Dangiang-Jayabakti-Cipangramatan		8 Km	
		23 Jalan Ds. Talagasari - Taraju		5 Km	
		24 Jalan Poros Ds. Ciudian - Sukamulya - Pancasura - Sukawangi		4,6 Km	
		25 Jalan Poros Ds. Cigintung - Mekartani - Saribakti		6,7 Km	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		26	Jalan kabupaten dekat SMP Pamengpeuk	0,2 Km	
		27	Jalan Bojongrandu - Tegalgede Blok Kp. Simpang KM 1+600	-	
		28	Drainase Jalan By Pass. Anwar Musadad	-	
		29	Drainase Guntur - Kencana	-	
		30	Drainase Guntur - Melati	-	
		31	Drainase Guntur Cendana	-	
		32	P2WKSS (pengadaan infras: Jalan)	-	
		33	Jalan Ds. Cinagara Kec. Malangbong	-	
		34	TPT Jalan Kp. Pasirucing Ds. Mekartani Kec. Singajaya	-	
		35	Jalan Ds. Danoh - Nanggerang Menuju Cipanas	-	
		36	Jalan Kp. Simpangsari RT 03 RW 03 Ds.Mekarsari Kec. Cibalong	-	
		37	TPT Saluran Air Jalan Ds. Cintarasa dan Kersamenak Kec. Samarang	-	
		38	Jalan Kubang Kp. Cibodas Ds. Sukajaya Kec. Cisewu	-	
		39	TPT Jalan Ds. Kp. Pangokokan RW 01 Ds. Sukalilah Kec. Sukaresmi	-	
		40	TPT Jalan Kp. Haurkuning RW 02 Ds. Cihaurkuning Kec.Malangbong	-	
		41	Jalan Ds. Garumukti Kec. Pamulihan	-	
		42	Jalan Kp. Cipongok RT 02 RW 06 Ds. Mekartani Kec. Singajaya	-	
		43	Jalan Ds. Ds. Hegarmanah Kec. Bungbulang	-	
		44	Jalan Ds. Ds. Mekarsari Kec. Mekarmukti	-	
		45	Jalan Ds. Danoh - Nanggerang - Cipanas Ds. Nyalindung Kec. Cisewu	-	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		46	TPT Jalan Ds. Blok Sawah Peuneuy Ds. Pangrumasan Kec.Peundeuy	-	
		47	TPT Jalan Kp. Nyengklod RT 04 RW 03 Ds. Cintadamai Kec.Sukaresmi	-	
4	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	26,27 Km	
		1	Jalan Perkotaan Garut	13,97 Km	
		2	Jalan H. Hasan Arif dari LP ke Bagendit	6 Km	
		3	Jalan Proklamasi Kec. Tarogong Kidul	2,74 Km	
		4	Jalan Gatot Subroto Perumahan Cempaka Hotmix	1,5 Km	
		5	Jalan Sukapadang - Cikamiri Kec. Samarang.	2,06 Km	
5	Pembangunan Jembatan		Panjang Jembatan yang Dibangun		
		1	Jembatan Cimanuk (ruas jalan By Pass II)		Jalur Lingkar Luar Garut sebagai Bagian dari Perpres
		2	Jembatan Kp. Pelag Ds. Sukalilah		Penanganan Bencana
		3	Jembatan Sakambangan (Sungai Cibaluk)		Penanganan Bencana
		4	Jembatan Leuwi Nanggung (Sungai Cikaso)		Penanganan Bencana
		5	Jembatan Daeu (Sungai Cipalebuh)		Penanganan Bencana
		6	Jembatan Cibeura - Cigaronggong		
		7	Jembatan Kp. Cilegong Ds. Sukalilah		Penanganan Bencana
		8	Jembatan Bangbayang (Sungai Ciawi)		Penanganan Bencana

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		9 Jembatan Punaga (Sungai Cipalebuh)			Penanganan Bencana
		10 Jembatan Rancahayam (Sungai Ciawi)			Penanganan Bencana
		11 Jembatan Tipar			Penanganan Bencana
		12 Jembatan Leuwipanjang Penghubung Kp.Cidatar dengan Kp.Gunung Gadung Ds. Cigaronggong Kec. Cibalong			Penghubung Antar Desa
		13 Jembatan GSW KM 7+814			Jalan Alternatif, Menghindari Kemacetan Akibat Pertumbuhan Perkotaan

Sumber : SIPD

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan setiap daerah menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan ayat (2) Pasal 2, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*. Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan yang *komprensif* dan terintegrasi, penyusunan rencana kerja mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Nasional serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*.

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 bertema **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- PN1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- PN2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- PN3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- PN4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- PN5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- PN6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- PN7 : Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 sebagai berikut:

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Peningkatan kualitas SMD melalui kesehatan dan pendidikan;
- 3) Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *Decent Job*;
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha;
- 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 6) Pembangunan rendah karbon transisi energi;
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi;
- 8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 bertema **“Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”** dengan prioritas pembangunan:

- PP1 : Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
- PP2 : Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
- PP3 : Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
- PP4 : Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
- PP5 : Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
- PP6 : Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
- PP7 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
- PP8 : Gerakan Membangun Desa;



- PP9 : Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;  
 PP10 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
 PP11 : Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Arah kebijakan Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Pencapaian target indikator makro pembangunan tahun 2023;
- 2) Percepatan pemulihan ekonomi Jawa Barat;
- 3) Penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan;
- 4) Penuntasan prioritas pembangunan daerah melalui program Jabar Juara.

Berdasarkan hasil identifikasi dan telaah terhadap kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, prioritas pembangunan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

**Prioritas Nasional (PN):**

PN2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemerataan.

PN5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

**Prioritas Provinsi (PP):**

PP10 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Prioritas Daerah (PD):**

PD4 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Secara Merata.

**Prioritas Nasional (PN):**

PN6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

**Prioritas Provinsi (PP):**

PP6 : Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana.

PP10 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Prioritas Daerah (PD):**

PD6 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana .

Tabel 3.1  
 Identifikasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024  
 dengan Prioritas Nasional Tahun 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

<b>Prioritas Nasional (PN)</b>	<b>Prioritas Provinsi (PP)</b>	<b>Prioritas Daerah (PD)</b>	<b>Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait dengan Prioritas Daerah</b>
PN1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	PD1 Penurunan Angka Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Prioritas Nasional: PN1, PN2, PN3 Prioritas Provinsi: PP2, PP4
PN2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemerataan	PP2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	PD2 Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban Serta Politik dan Demokrasi	Prioritas Nasional: PN4, PN7 Prioritas Provinsi: PP5, PP9
PN3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	PD3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, KB, Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Serta Pemuda dan Olah Raga	Prioritas Nasional: PN3 Prioritas Provinsi: PP1, PP5
PN4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	PD4 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Secara Merata	Prioritas Nasional: PN2, PN5 Prioritas Provinsi: PP10
PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP5 Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	PD5 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	Prioritas Nasional: PN1, PN4 Prioritas Provinsi: PP2, PP3, PP11

<b>Prioritas Nasional (PN)</b>	<b>Prioritas Provinsi (PP)</b>	<b>Prioritas Daerah (PD)</b>	<b>Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait dengan Prioritas Daerah</b>
PN6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PP6 Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PD6 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana	Prioritas Nasional: PN6 Prioritas Provinsi: PP6, PP10
PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PD7 Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Prioritas Nasional: PN7 Prioritas Provinsi: PP7, PP8
	PP8 Gerakan Membangun Desa	PD8 Peningkatan Investasi dan Pendapatan Daerah	Prioritas Nasional: PN1, PN7 Prioritas Provinsi: PP2, PP7
	PP9 Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara		
	PP10 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	PP11 Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata		

Sumber : RKP Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Garut

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran renja Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

#### **Tujuan:**

Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, sanitasi dan bangunan yang berkualitas dan memadai dengan berbasis penataan ruang.

#### **Sasaran:**

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem irigasi dan konservasi sumber daya air;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
5. Meningkatnya kualitas bangunan gedung;
6. Meningkatnya kualitas bangunan dan lingkungan;
7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan;
8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
9. Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang;
10. Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur permukiman.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan yang dirumuskan dalam pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Rumusan program dan kegiatan mempertimbangkan dan diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dalam upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah. Pencapaian visi **“Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”** dituangkan dalam misi yang terkait dengan program, kegiatan serta tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.

Pencapaian misi tersebut adalah sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan, pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana.

2. Pencapaian NSPK dan SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

SPM yang ditelahi ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Garut menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal.

Berdasarkan Peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai jenis pelayanan dasar penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2023:

1. Jumlah program sebanyak 10 (sepuluh) program, jumlah kegiatan sebanyak 21 (dua puluh satu) kegiatan dan jumlah sub kegiatan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan.
2. Lokasi program dan kegiatan berada di wilayah Kabupaten Garut tersebar di 42 (empat puluh dua) kecamatan. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah difokuskan pada daerah yang mengalami rawan kemiskinan, kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) serta stunting.
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif tahun 2023 sebesar Rp457.822.572.237,00 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut/Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dengan jumlah perkiraan maju sebesar Rp503.190.102.220,00.

Rumusan Program dan Kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, sedangkan rumusan Sub Kegiatan mengalami perubahan. Sub Kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD sebanyak 71 (tujuh puluh satu) sub kegiatan dan rumusan sub kegiatan dalam Rencana Kerja sebanyak 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan. Hal ini disebabkan dalam Rencana Kerja lebih difokuskan pada pencapaian target Renstra dan kinerja pelayanan yang masih rendah.

Pagu indikatif tahun 2023 sebesar Rp457.822.572.237,00 berbeda dengan rancangan awal RKPD yaitu sebesar Rp1.268.391.537.600,00, disebabkan untuk optimalisasi pencapaian target, rasionalisasi/logis pagu belanja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan *trend* anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun-tahun sebelumnya.

Rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Lembar : 1 dari 19

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik Nilai	34.456.252.037		Baik Nilai	37.824.610.000		
				Nilai Evaluasi SAKIP	BB Nilai			BB Nilai			
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Sesuai Ketentuan	100%	9.914.200	100%	11.000.000		
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2 Dokumen	4.961.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	5.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	4 Laporan	4.952.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	5.500.000
<b>1 03 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>31.290.086.400</b>			<b>100%</b>	<b>34.419.110.000</b>
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	3336 Orang/bulan	31.285.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3336 Orang/bulan	34.413.610.000
1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2 Laporan	4.986.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	5.500.000
<b>1 03 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>449.841.927</b>			<b>100%</b>	<b>460.000.000</b>
1 03 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Dokumen	449.841.927	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	460.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 03 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		100%	1.001.885.200			100%	1.066.500.000
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Paket	13.243.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	15.500.000
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Paket	274.493.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	300.000.000
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Paket	149.920.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	160.000.000
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Dokumen	67.578.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Laporan	91.695.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	96.000.000
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Laporan	404.955.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	420.000.000
1.03.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>174.923.000</b>			<b>100%</b>	<b>225.000.000</b>
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	15 Unit	174.923.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Unit	225.000.000
1.03.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>427.970.310</b>			<b>100%</b>	<b>450.000.000</b>
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Laporan	219.997.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	225.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Laporan	23.148.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	30.000.000
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Laporan	184.824.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	195.000.000
1.03.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>1.101.631.000</b>			<b>100%</b>	<b>1.193.000.000</b>
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	124 Unit	131.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		124 Unit	138.000.000
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	31 Unit	545.915.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		31 Unit	605.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2 Unit	424.266.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	450.000.000
1	03 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>		<b>Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi</b>	<b>84,40%</b>	<b>17.342.000.000</b>		<b>84,40%</b>	<b>19.076.200.000</b>
				<b>Persentase Tampung Air yang Tersedia</b>	<b>82,54%</b>			<b>82,54%</b>	
1	03 02 2.01	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>3 Unit</b>	<b>12.142.000.000</b>			<b>3 Unit</b>	<b>13.356.200.000</b>
1	03 02 2.01 07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Titik	846.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Titik	930.600.000
1	03 02 2.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,50 Km	2.396.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0,50 Km	2.635.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 03 02 2.01 14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	5.900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	6.490.000.000
1 03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Km	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Km	1.100.000.000
1 03 02 2.01 47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	2.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	2.200.000.000
1 03 02 2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang Jaringan Irigasi yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dioperasikan &amp; Dipelihara</b>		<b>105,20 Km</b>	<b>5.200.000.000</b>			<b>105,20 Km</b>	<b>5.720.000.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,187 Km	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0,187 Km	220.000.000
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105 Km	5.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		105 Km	5.500.000.000
1 03 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Cakupan Air Minum Layak</b>		<b>90,04%</b>	<b>9.446.000.000</b>			<b>90,04%</b>	<b>10.390.600.000</b>
1 03 03 2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Kegiatan SPAM</b>		<b>2582 SR</b>	<b>9.446.000.000</b>			<b>2582 SR</b>	<b>10.390.600.000</b>
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1612 SR	7.446.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1612 SR	8.190.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 03 03 2.01 19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Kegiatan Perluasan SPAM	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	970 SR	2.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		970 SR	2.200.000.000
1 03 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Cakupan Sanitasi Layak</b>		<b>68,11%</b>	<b>7.701.000.000</b>			<b>68,11%</b>	<b>8.471.100.000</b>
1 03 05 2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga yang Mempunyai Pengolahan Air Limbah Domestik</b>		<b>1168 Rumah Tangga</b>	<b>7.701.000.000</b>			<b>1168 Rumah Tangga</b>	<b>8.471.100.000</b>
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1168 Rumah Tangga	7.701.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1168 Rumah Tangga	8.471.100.000
1 03 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase Penurunan Luas Genangan Air</b>		<b>25%</b>	<b>3.790.000.000</b>			<b>25%</b>	<b>4.169.000.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Direhab dan Dibangun		2495 M	3.790.000.000		2495 M	4.169.000.000
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	920 M	2.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	920 M	2.200.000.000
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1575 M	1.790.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1575 M	1.969.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 03 08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis dan Fungsi</b>		<b>9,45%</b>	<b>69.150.000.000</b>			<b>9,45%</b>	<b>76.065.000.000</b>
1 03 08 2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Jumlah Bangunan Gedung yang Memenuhi Klasifikasi Bangunan</b>		<b>111 Unit</b>	<b>69.150.000.000</b>			<b>111 Unit</b>	<b>76.065.000.000</b>
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105 Dokumen	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		105 Dokumen	550.000.000
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	68.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	75.350.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 03 08 2.01 04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Dokumen	110.000.000
1 03 08 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	55.000.000
1 03 09	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata</b>		<b>20%</b>	<b>18.488.600.000</b>			<b>20%</b>	<b>20.000.000.000</b>
1 03 09 2.01	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya</b>		<b>4 Kawasan</b>	<b>18.488.600.000</b>			<b>4 Kawasan</b>	<b>20.000.000.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kawasan	18.488.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Kawasan	20.000.000.000
1	03	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase Kemantapan Jalan</b>		<b>55,27%</b>	<b>293.452.720.200</b>			<b>55,27%</b>	<b>322.797.992.220</b>
1	03	10	2.01		<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang Jalan yang Dibangun, Direkonstruksi, Direhabilitasi dan Dipelihara</b>		<b>750,06 Km</b>	<b>293.452.720.200</b>			<b>750,06 Km</b>	<b>322.797.992.220</b>
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	728.606.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Dokumen	801.466.820

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 03 10 2.01 02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48511 M <sup>2</sup>	61.900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48511 M <sup>2</sup>	68.090.000.000
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,57 Km	39.860.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		44,57 Km	43.846.000.000
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89,25 Km	104.034.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		89,25 Km	114.437.840.000
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,27 Km	21.065.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26,27 Km	23.171.500.000
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	590 Km	17.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		590 Km	18.700.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3085,66 M	46.264.714.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3085,66 M	50.891.185.400
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	194 M	900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		194 M	990.000.000
1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	775 Km	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		775 Km	1.650.000.000
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	110.000.000
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Terlatih dan Bersertifikat	27,24%	2.000.000.000		27,24%	2.200.000.000			
				Persentase Proyek Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100%			100%				
1	03	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan dan Tersertifikasi	120 Orang	750.000.000	120 Orang	825.000.000			
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	60 Orang	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Orang	440.000.000
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	60 Orang	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Orang	385.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 03 11 2.02	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Data dan Sistem Informasi Jasa Konstruksi</b>		<b>10 Dokumen</b>	<b>1.050.000.000</b>			<b>10 Dokumen</b>	<b>1.155.000.000</b>
1 03 11 2.02 02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	165.000.000
1 03 11 2.02 07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	2 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	220.000.000
1 03 11 2.02 08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	4 Dokumen	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	495.000.000
1 03 11 2.02 09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	3 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	275.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		1 Dokumen	200.000.000			1 Dokumen	220.000.000
1 03 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	220.000.000
1 03 12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang</b>		84%	1.996.000.000			84%	2.195.600.000
1 03 12 2.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Penetapan RTRW dan RRTR</b>		3 Dokumen	1.223.000.000			3 Dokumen	1.345.300.000
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	836.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	920.150.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	386.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	425.150.000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	<b>2.03</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>386.500.000</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>425.150.000</b>
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	386.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	425.150.000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	<b>2.04</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>386.500.000</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>425.150.000</b>
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	386.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	425.150.000
								<b>TOTAL</b>	<b>457.822.572.237</b>		<b>TOTAL</b>	<b>503.190.102.220</b>

Sumber : SIPD dan Renstra Dinas PUPR Tahun 2019-2024

### 3.4 Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

Berkenaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum yang mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan target pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Sat	Target Tahun 2023
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	90,04
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	68,11

Sumber : Renstra Dinas PUPR Tahun 2019-2024

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pendanaan yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2023 akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Merupakan program penunjang pelaksanaan fungsi dinas yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekertariat.

**2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Merupakan program urusan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air. Indikator capaian program terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase Luas Areal yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi 84,40% dan Persentase Tampung Air yang Tersedia 82,54%. Terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan. Indikator dan target kegiatan Jumlah Tampung Air Baku yang Dibangun 3 unit dan Panjang Jaringan Irigasi yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dioperasikan & Dipelihara 105,20 km.

- 1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
  - (1) Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku;
  - (2) Pembangunan Tanggul Sungai;
  - (3) Pembangunan Polder/Kolam Retensi;
  - (4) Normalisasi/Restorasi Sungai; dan
  - (5) Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air.
- 2) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
  - (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; dan
  - (2) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

### **3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Merupakan program urusan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman. Indikator capaian program Cakupan Air Minum Layak 90,04%. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Indikator dan target kegiatan Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Kegiatan SPAM 2582 SR.

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
  - (1) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan; dan
  - (2) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.

### **4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Merupakan program urusan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman. Indikator capaian program Cakupan Sanitasi Layak 68,11%. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Indikator dan target kegiatan Jumlah Rumah Tangga yang Mempunyai Pengolahan Air Limbah Domestik 1168 Rumah Tangga.

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
  - (1) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.

### **5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

Merupakan program urusan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air.

Indikator capaian program Persentase Penurunan Luas Genangan Air 25%. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Indikator dan target kegiatan Panjang Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Direhab dan Dibangun 2495 M.

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
  - (1) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan; dan
  - (2) Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan.

## **6. Program Penataan Bangunan Gedung**

Merupakan program urusan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Bangunan. Indikator capaian program Persentase Bangunan Gedung yang Layak Teknis dan Fungsi 9,45%. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Indikator dan target kegiatan Jumlah Bangunan Gedung yang Memenuhi Klasifikasi Bangunan 111 Unit.

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Sub Kegiatan:
  - (1) Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG;
  - (2) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota;
  - (3) Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - (4) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota.

## **7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

Merupakan program urusan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Bangunan. Indikator capaian program Persentase Luas Bangunan dan Lingkungan yang Tertata 20%. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Indikator dan target kegiatan Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 4 kawasan.

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
  - (1) Penataan Bangunan dan Lingkungan.

## **8. Program Penyelenggaraan Jalan**

Merupakan program urusan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Marga. Indikator capaian program Persentase Kemantapan Jalan 55,27%. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan. Indikator dan target kegiatan Panjang Jalan yang Dibangun, Direkonstruksi, Direhabilitasi dan Dipelihara 750,06 Km.

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
  - (1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
  - (2) Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan;
  - (3) Pembangunan Jalan;
  - (4) Rekonstruksi Jalan;
  - (5) Rehabilitasi Jalan;
  - (6) Pemeliharaan Rutin Jalan;
  - (7) Pembangunan Jembatan;
  - (8) Pemeliharaan Rutin Jembatan;
  - (9) Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat;
  - (10) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan; dan
  - (11) Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.

## **9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Merupakan program urusan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Jasa Konstruksi. Indikator capaian program terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Terlatih dan Bersertifikat 27,24% dan Persentase Proyek Tanpa Kecelakaan Konstruksi 100%. Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan. Indikator dan target kegiatan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan dan Tersertifikasi 120 Orang, Jumlah Data dan Sistem Informasi Jasa Konstruksi 10 Dokumen dan Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1 Dokumen.

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Sub Kegiatan:
  - (1) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi; dan
  - (2) Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi.
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
  - (1) Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi;
  - (2) Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan;
  - (3) Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi;
  - (4) Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.

- 3) Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, Sub Kegiatan:
  - (1) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

## **10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Merupakan program urusan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Penataan Ruang. Indikator capaian program Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang 84%. Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Indikator dan target kegiatan Jumlah Dokumen Penetapan RTRW dan RRTR 3 Dokumen, Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen.

- 1) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
  - (1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota; dan
  - (2) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
- 2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
  - (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah.
- 3) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
  - (1) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

Pendanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 secara umum dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut yang bersumber Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023, alokasi anggaran disimulasikan hanya murni dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut yang bersumber Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perubahan pagu berpotensi terjadi ketika Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang didalamnya mencakup penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun secara tahunan ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Tahun 2023, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2023 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai.

Rencana Kerja akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak. Adanya Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat melaksanakan tugas secara bertahap, terarah dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi lain yang terkait untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**